



LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
TAHUN 2021

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANJAR  
TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 sesuai jadwal yang ditentukan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kab. Banjar disusun sesuai Peraturan Persiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan ini merupakan upaya kami menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2021, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Banjar.

Hasil pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras dari semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.

Martapura, Januari 2022  
Sekretaris Daerah,



**Dr. Ir. H. MOKHAMAD HILMAN, ST, MT**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197000328 199503 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	v
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	vi
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN</b> .....	1
<b>A.1 Maksud Laporan</b> .....	1
<b>A.2 Tujuan Laporan</b> .....	1
<b>B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI</b> .....	1
<b>B.1 KEDUDUKAN</b> .....	2
<b>B.2 TUGAS</b> .....	2
<b>B.3 FUNGSI</b> .....	2
<b>C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> <sup>26</sup> .....	
<b>D. ISU STRATEGIS</b> .....	27
<b>E. SISTEMATIKA PENYAJIAN</b> .....	28
<b>BAB II</b> .....	29
<b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	29
<b>A. INDIKATOR KINERJA UTAMA</b> .....	29
<b>B. PERJANJIAN KINERJA</b> .....	30
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	47
<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</b> .....	47
<b>A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2021</b> .....	47
<b>A.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA</b> .....	51
<b>A.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA</b> .....	88
<b>A.4 REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2021 DAN TARGET NASIONAL</b> .....	91
<b>B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN</b> .....	92

<b>B.1 SASARAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEAGAMAAN.....</b>	<b>92</b>
<b>KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ....</b>	<b>98</b>
<b>B.2 SASARAN PELESTARIAN BUDAYA KEAGAMAAN.....</b>	<b>100</b>
<b>B.3 SASARAN MENINGKATNYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK .</b>	<b>102</b>
<b>KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA.....</b>	<b>105</b>
<b>B.4 SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK .....</b>	<b>108</b>
<b>KEGIATAN PENATAAN ORGANISASI.....</b>	<b>110</b>
<b>B.5 SASARAN MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH</b>	
<b>.....</b>	<b>142</b>
<b>C. REALISASI ANGGARAN.....</b>	<b>150</b>
<b>C.1 ANALISA EFESIENSI.....</b>	<b>152</b>
<b>D. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN</b>	
<b>2020 154</b>	
<b>D.1 EVALUASI KINERJA TAHUN 2020 .....</b>	<b>154</b>
<b>D.2 TINDAK LANJUT .....</b>	<b>154</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>155</b>
<b>1. KESIMPULAN.....</b>	<b>155</b>
<b>2. SARAN-SARAN.....</b>	<b>155</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>156</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Realisasi Anggaran Persasaran.....	vii
Tabel 2 Permasalahan Pada SKPD .....	26
Tabel 3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 .....	30
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	31
Tabel 5 Skala Nilai Perangkat Kinerja .....	48
Tabel 6 Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	48
Tabel 7 Perbandingan Realisasi/ Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya .....	53
Tabel 8 Kenaikan/Penurunan Capaian IKM Kelompok Unit Pelayanan Tahun 2021 dibandingkan Dengan Tahun 2020.....	59
Tabel 9 Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan PD Beserta Rencana Pendanaannya .....	61
Tabel 10 Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Target Periode Akhir.....	88
Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021, Realisasi Provinsi dan Nasional .....	91
Tabel 12 Realiasi Indikator Tahun 2021 .....	92
Tabel 13 Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat .....	94
Tabel 14 Capaian Program/Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021 .....	97
Tabel 15 Realisasi Indikator Tahun 2021 .....	100
Tabel 16 Realisasi Indikator Tahun 2021 .....	102
Tabel 17 Capaian Program/ Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021 .....	105
Tabel 18 Realisasi Indikator Tahun 2021 .....	108
Tabel 19 Capaian Program / Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021 Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik .....	109
Tabel 20 Realisasi Indikator Tahun 2021 .....	142
Tabel 21 Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Sekretariat Daerah .....	145
Tabel 22 Efisien Penggunaan Sumber Daya .....	153

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Capaian Kinerja Sasaran.....	50
Grafik 2 Perbandingan Realisasi / Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya .....	59
Grafik 3 Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Target Periode Akhir .....	90
Grafik 4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 .....	152

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Bappelitbang Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti - bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar 2016 - 2021 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2021 telah berhasil dicapai.

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Banjar yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, sumber daya manusia dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Tabel 1 Realisasi Anggaran Persasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Target	Realisasi	%
			(Rp)	(Rp)	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pemberdayaan lembaga keagamaan	Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan	555.520.000	403.329.232	72,60
	Program Peningkatan Pengelolaan Lembaga Zakat	Jumlah ZIS yang terkumpul	555.520.000	403.329.232	72,60
2	Pelestarian budaya keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	3.648.157.400	3.335.489.248	91,43
	Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar	Persentase kegiatan keagamaan yang diperingati	3.648.157.400	3.335.489.248	91,43
3	Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Persentase SKPD yang meinput RUP ke aplikasi SIRUP	563.418.100	410.619.151	72,88
	Program pengadaan barang dan jasa	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu	563.418.100	410.619.151	72,88
4	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai/Skor EKPPD	395.111.700	379.173.524	95,97
	Program penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase keterisian data Indikator Kinerja Kunci (IKK)	395.111.700	379.173.524	95,97
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	789.291.000	720.583.052	91,29
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan pembinaan kelembagaan	Prosentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumentasi road map reformasi birokrasi	789.291.000	720.583.052	91,29

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN**

#### **A.1 Maksud Laporan**

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

#### **A.2 Tujuan Laporan**

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar

### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI**

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar; dan
6. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

- Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
7. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah.

### **B.1 KEDUDUKAN**

SKPD merupakan unsur Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati .

### **B.2 TUGAS**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi Unsur Pendukung Urusan Pemerintah.

### **B.3 FUNGSI**

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

#### **1) Sekretaris Daerah**

a) Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut :

- merumuskan visi, misi, rencana strategis Sekretariat Daerah;
- mengoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah;
- mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- menyelenggarakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah;
- menyelenggarakan pelayanan kesekretariatan Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Daerah;
- mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta mengarahkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara terpadu;
- mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan Kementerian atau Lembaga tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- membina pemerintahan dalam arti menganalisa data dan rumusan program serta memonitoring perkembangan penyelenggaraan pembinaan pemerintahan;
- membina pembangunan dalam arti menganalisa data dan rumusan program serta memonitoring perkembangan penyelenggaraan pembangunan;
- membina masyarakat dalam arti menganalisa data dan rumusan program serta memonitoring perkembangan penyelenggaraan pembinaan masyarakat;
- membina administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah dan Instansi yang ada di Daerah;

- mengoordinasikan perumusan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok penyelenggaraan pemerintah; dan
  - memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka perumusan kebijakan/pengambilan keputusan.
- 2) Asisten Pemerintahan
- a) Tugas dan Fungsi Asisten Pemerintahan adalah sebagai berikut :
- menyusun kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
  - mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
  - mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
  - memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
  - memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
  - menyiapkan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
- Bagian Pemerintahan
- b) Tugas dan fungsi Bagian Pemerintahan adalah sebagai berikut :
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta kerjasama dan otonomi daerah;
  - menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta kerjasama dan otonomi daerah;
  - menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta kerjasama dan otonomi daerah;
  - menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta kerjasama dan otonomi daerah;
  - menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta kerjasama dan otonomi daerah; dan
  - melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
- c) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan

Uraian tugas Sub Bagian Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :

- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan;
- menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- memfasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

d) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan

- melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau kelurahan;
- melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan/atau pemindahan ibu kota kecamatan;
- melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
- menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
- menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat;
- menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

e) Uraian Tugas Sub Bagian Kerja Sama Otonomi Daerah sebagai berikut:

- menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);
- melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah;
- melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- memfasilitasi pengusulan Izin dan Cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- menyusun bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah;
  - melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum
  - melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif;
  - melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang otonomi daerah;
  - menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dalam negeri;
  - melaksanakan pengolahan data kerja sama daerah dalam negeri;
  - melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama daerah dalam negeri;
  - melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah;
  - melaksanakan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah dalam negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama daerah dalam negeri; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- f) Uraian Tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut:
- menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
  - menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
  - menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
- g) Uraian tugas Sub Bagian Bina Mental Spiritual sebagai berikut :
- menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
  - menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

- menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
  - menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
  - menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
  - menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan koordinasi urusan keagamaan meliputi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), Majelis Ulama Indonesia (MUI), urusan haji, hari-hari besar islam dan kegiatan keagamaan lainnya;
  - menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kepada badan/lembaga, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga bidang keagamaan; h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait keagamaan pada Sub. Bagian Bina Mental Spiritual; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- h) Bagian Kesejahteraan Masyarakat sebagai berikut :
- menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta transmigrasi;
  - menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta transmigrasi
  - menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kepada badan/lembaga, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga di bidang kesejahteraan sosial;
  - menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga,

pariwisata, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan kemasyarakatan lainnya; dan

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya

i) Uraian Tugas Bagian Hukum sebagai berikut:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

j) Bagian Perundang-undangan sebagai berikut :

- menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah;
- melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah;
- menyiapkan bahan penjelasan Kepala Daerah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah;
- menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah;
- melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum daerah;
- menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum daerah;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya

k) Bagian Bantuan Hukum sebagai berikut :

- melaksanakan koordinasi penanganan permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukum perkara perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, sengketa informasi publik

baik di dalam maupun di luar pengadilan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan;

- melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam penanganan perkara hukum;
- melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
- menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion);
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan perkara sengketa hukum; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

l) Bagian Dokumentasi dan Informasi sebagai berikut :

- melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan daerah;
- melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- memberikan pelayanan administrasi informasi produk hukum;
- melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan dokumentasi dan penyediaan informasi produk hukum daerah; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

**Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

a. Uraian tugas Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai berikut:

- penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perekonomian, dan sumber daya alam;
- penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perekonomian, dan sumber daya alam;
- penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perekonomian, dan sumber daya alam;

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- b. Uraian tugas Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai berikut :
- menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
  - menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah
  - melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
  - melakukan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- c. Uraian tugas Sub Bagian Perekonomian sebagai berikut :
- menyusun bahan dan data serta analisa pengembangan pariwisata, koperasi, Usaha mikro kecil, menengah (UMKM), perindustrian, dan perdagangan;
  - menyusun bahan perumusan kebijakan pengembangan pariwisata, koperasi, Usaha mikro kecil, menengah (UMKM), perindustrian, dan perdagangan;
  - melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata, koperasi, Usaha mikro kecil, menengah (UMKM), perindustrian, dan perdagangan;
  - menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum pengembangan pariwisata, koperasi, Usaha mikro kecil, menengah (UMKM), perindustrian, dan perdagangan;
  - melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan pariwisata, koperasi, Usaha mikro kecil, menengah (UMKM), perindustrian, dan perdagangan;
  - memfasilitasi dan pembinaan di bidang pengembangan pariwisata, koperasi, Usaha mikro kecil, menengah (UMKM), perindustrian, dan perdagangan; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- d. Uraian tugas Sub Bagian Sumber Daya Alam sebagai berikut :

- menyusun bahan dan data serta analisa di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
  - menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - memfasilitasi kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, dan lingkungan hidup;
  - melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - memfasilitasi dan pembinaan di bidang pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, dan lingkungan hidup; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- e. Uraian tugas Bagian Administrasi Pembangunan sebagai berikut:
- menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
  - menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian program;
  - menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian program; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
- f. Uraian tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut :

- menyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan program pembangunan daerah;
  - menyusun bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan program pembangunan daerah;
  - menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan program pembangunan daerah;
  - melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan sinergitas program pembangunan daerah;
  - melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan daerah;
  - melaksanakan penyusunan program pembangunan dalam rangka mengembangkan akses pembangunan daerah;
  - melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan dalam rangka mengurangi resiko dan kerugian pihak lain dalam rangka kelancaran program pembangunan daerah;
  - melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
  - menyusun rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan daerah;
  - menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
  - melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
  - mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
  - mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
  - menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan kebijakan program pembangunan daerah; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- g. Uraian tugas Sub Bagian Pengendalian Program sebagai berikut :
- menyusun rencana kegiatan pengendalian program pembangunan;
  - menyusun bahan kebijakan pengendalian pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar pembangunan sesuai dengan program pembangunan daerah;

- menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan dalam rangka pengendalian program pembangunan daerah;
  - melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mengurangi tingkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan program pembangunan baik oleh pemerintah daerah maupun swasta;
  - mengendalikan sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga pemerintah daerah maupun swasta;
  - melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pembangunan; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- h. Uraian tugas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut:
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
  - menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
  - menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
  - menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
- i. Uraian tugas Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut:
- melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang dan jasa;
  - melaksanakan riset dan analisis pasar barang dan jasa;
  - melaksanakan penyusunan strategi pengadaan barang dan jasa;

- melaksanakan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
  - melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa;
  - melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
  - membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  - memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- j. Uraian tugas Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagai berikut :
- melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
  - melaksanakan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik
  - memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa;
  - mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
  - melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ);
  - melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
  - mengelola informasi kontrak;
  - mengelola informasi manajemen barang dan jasa hasil pengadaan; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya
- k. Uraian tugas Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut:
- melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang dan Jasa dan personel unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ);
  - melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang dan jasa;
  - melaksanakan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;

- melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ);
  - melaksanakan analisis beban kerja unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ);
  - melaksanakan pengelolaan personil unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ);
  - melaksanakan pengembangan sistem insentif personel unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ);
  - memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
  - melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  - melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, dan desa;
  - melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan (SPRUP), sistem pengadaan secara elektronik (SPSE), e-katalog, e-monev, sikap informasi kinerja penyedia (SIKaP);
  - melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- I. Uraian tugas Asisten Administrasi Umum sebagai berikut:
- menyusun kebijakan daerah di bidang organisasi;
  - melaksanakan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan;
  - mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
  - menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan;
  - memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
  - menyiapkan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah;
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum, protokol dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan yang berkaitan dengan tugasnya; dan

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- m. Uraian tugas Bagian Umum sebagai berikut:
- Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan staf ahli dan kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga;
  - Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga;
  - menyusun bahan pengordinasian terkait tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
  - melaksanakan fungsi lain yang diberikan Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.
- n. Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian sebagai berikut :
- melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian, perjalanan dinas Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat kedinasan;
  - melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian, perjalanan dinas Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;
  - melaksanakan pengelolaan kearsipan; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- o. Uraian tugas Sub Bagian Perlengkapan sebagai berikut :
- melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Sekretariat Daerah;
  - melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah;
  - melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati serta Bupati dan Wakil Bupati serta kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan;
  - melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati serta Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati;

- melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- p. Uraian tugas Sub Bagian Rumah Tangga sebagai berikut :
- menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah;
  - merencanakan penyusunan program dan kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah;
  - menyiapkan bahan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah;
  - melaksanakan urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah;
  - melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan rapat-rapat; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- q. Uraian tugas Bagian Organisasi sebagai berikut:
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
  - menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
  - menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
  - menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.
- r. Uraian tugas Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan sebagai berikut :
- menyiapkan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);

- menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan organisasi Perangkat Daerah;
  - menyusun bahan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);
  - menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
  - menyusun kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi Perangkat Daerah;
  - menyusun profil kelembagaan Perangkat Daerah; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya
- s. Uraian tugas Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana sebagai berikut :
- menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja;
  - menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja/organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik; d. menghimpun dan memfasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah;
  - menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
  - melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya
- t. Uraian tugas Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut :
- menyusun bahan kebijakan teknis Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
  - menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten;
  - menyusun Road Map Reformasi Birokrasi;
  - melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

- u. Uraian tugas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagai berikut:
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan;
  - menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan;
  - menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.
- v. Uraian tugas Sub Bagian Protokol sebagai berikut :
- melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah;
  - menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
  - menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
  - melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
  - melaksanakan penyiapan perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- w. Uraian tugas Sub Bagian Komunikasi Pimpinan sebagai berikut :
- menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan Daerah;
  - memberi masukan kepada pimpinan Daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
  - memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan;
  - menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati;
  - menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat;
  - menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan;
  - menyusun naskah sambutan dan pidato Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

x. Uraian tugas Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan sebagai berikut :

- mendokumentasikan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
- menyusun notulensi rapat Bupati dan Wakil Bupati; dan
- memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

y. Uraian tugas Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

- menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan Sekretariat Daerah;
- menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan Sekretariat Daerah;
- menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan Sekretariat Daerah; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan sebagai berikut :

- menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Sekretariat daerah yang meliputi penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana kinerja (Renja) tahunan, rencana kerja anggaran (RKA);
- menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi rencana kerja anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah;
- menyusun perjanjian kinerja Sekretariat Daerah; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut :

- melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah;
- melaksanakan penatausahaan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah;
- melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah;
- melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah;

- melaksanakan sistem pengendalian intern; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.  
Uraian tugas Sub Bagian Pelaporan sebagai berikut :
- menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah;
- menyusun bahan Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- menyusun bahan laporan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
- menyusun bahan laporan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ);
- menyusun bahan laporan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah (LPPD);
- menyusun bahan laporan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (Tepra); dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Susunan organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
  1. Bagian Pemerintahan terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
    - b. Sub Bagian Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
    - c. Sub Bagian Kerjasama Dan Otonomi Daerah.
  2. Bagian Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Bina Mental ;
    - b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
    - c. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
  3. Bagian Hukum terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Perundang-Undangan;
    - b. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
    - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
  1. Bagian Perekonomian dan SDA terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
    - b. Sub Bagian Perekonomian ; dan
    - c. Sub Bagian Sumber Daya Alam.
  2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dari :
    - a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
    - b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
    - c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
  3. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - b. Sub Bagian Pengendalian Program.

- d. Asisten Administrai Umum, membawahi :
  - 1. Bagian Umum terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian ;
    - b. Sub Bagian Rumah Tangga; dan
    - c. Sub Bagian Perlengkapan.
  - 2. Bagian Protokol dan Humas terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Protokol; dan
    - b. Sub Bagian Acara, Tamu dan Humas.
  - 3. Bagian Organisasi terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Kelembagaan;
    - b. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur; dan
    - c. Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik.
  - 4. Bagian Administrasi terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Tata Usaha Pimpinan;
    - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
    - c. Sub Bagian Keuangan.

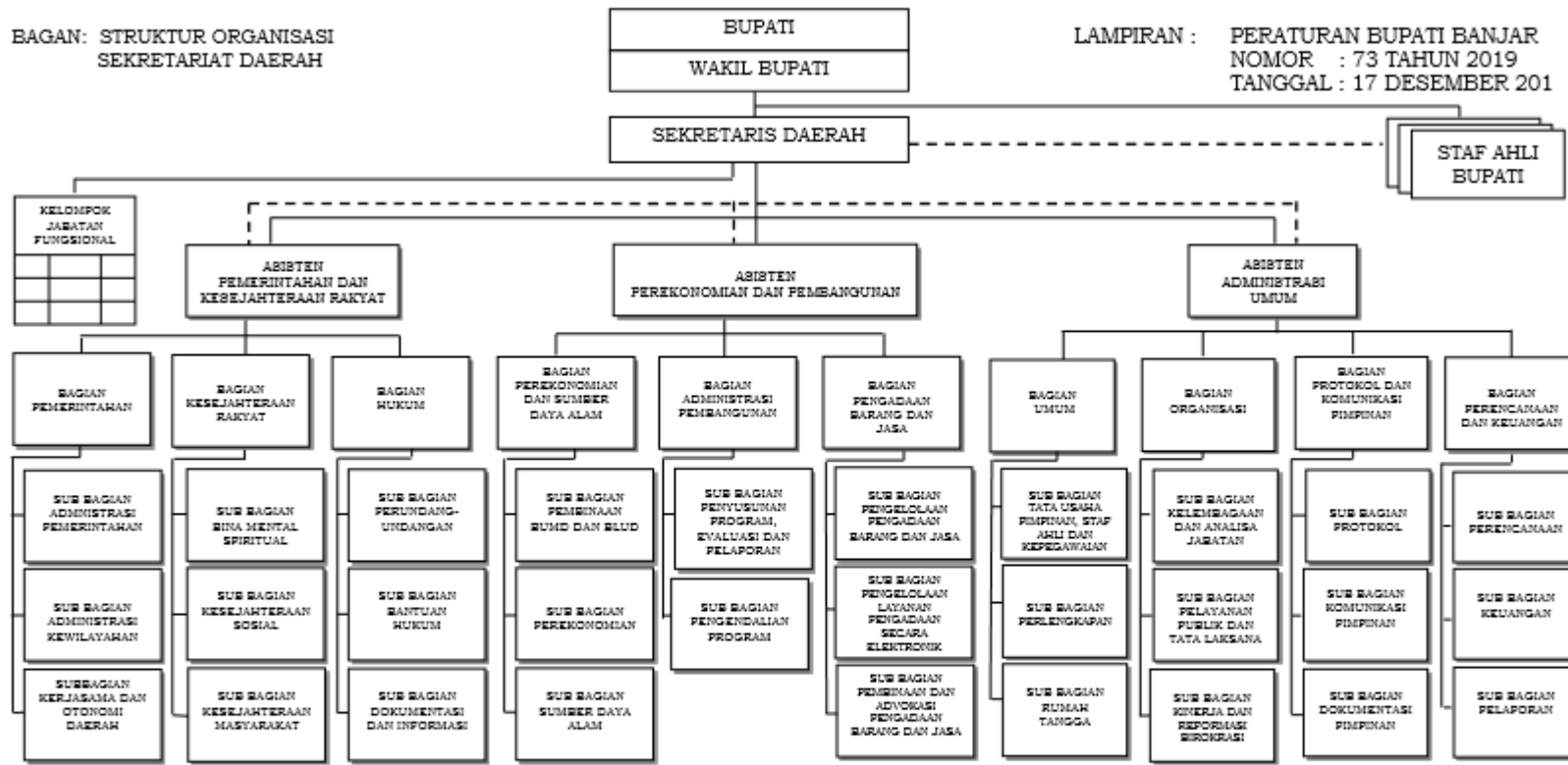
# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

15

BAGAN: STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR : 73 TAHUN 2019  
TANGGAL : 17 DESEMBER 201



KETERANGAN :

————— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

### C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan Sekretariat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif Dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (Renstra dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon masalah sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar masalah, dan hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Sekretariat Daerah masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

**Tabel 2 Permasalahan Pada SKPD**

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelestarian budaya yang berkaitan dengan kagamaan	Masih rendahnya manajemen perayaan hari besar keagamaan	Belum selarasnya pengamalan agama dengan seni dan budaya
2	Belum optimalnya pemberdayaan lembaga keagamaan	Masih rendahnya kualitas manajemen lembaga zakat	Belum optimalnya kapasitas lembaga zakat
3	Masyarakat merasakan terlambatnya manfaat hasil-hasil kegiatan pembangunan	Belum optimal SKPD dalam pengajuan lelang dalam hal ini ketepatan waktu pelaksanaan yang sesuai SiRUP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kesadaran SKPD Menginput RUP( Rencana Umum Pengadaan) ke Aplikasi Sirup (Sistem Informasi Umum Pengadaaan)</li> <li>2. Belum adanya hukuman kepada SKPD yang tidak menginput rencana umum pengadaan</li> </ol>
4	Belum terpadunya penyelenggaraan reformasi birokrasi antar SKPD yang mengawal reformasi birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja pelayanan publik belum memuaskan pengguna jasa pelayanan publik</li> <li>2. Belum optimalnya penataan kelembagaan dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya koordinasi antar SKPD</li> <li>2. Minimnya SDM penataan Kelembagaan dan penataan analisis formasi jabatan</li> </ol>

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		penataan analisis formasi jabatan	
5	Belum terpadunya penyelenggaraan reformasi birokrasi antar SKPD yang mengawal reformasi birokrasi	Kinerja pelayanan publik belum memuaskan pengguna jasa pelayanan publik terkait sarana prasarana	1. Kurangnya koordinasi antar SKPD
		Belum optimalnya penataan kelembagaan dan analisis jabatan	2. Minimnya SDM penataan Kelembagaan dan analisis jabatan
		3. Belum optimalnya koordinasi Sakip	3. masih rendahnya pemahaman mengenai akuntabilitas kinerja

#### D. ISU STRATEGIS

Secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Sekretariat Daerah sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam tugas Sekretariat Daerah.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya ditampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah sebagaimana tersebut di atas (Bab I.C). Isu srategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (UNRESOLVED MATTERS) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang. Lebih jelasnya lihat alur renstra pada aplikasi SIMPUN 19.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada Permendagri 86 Tahun 2017, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis (SKPD) adalah sebagai berikut:

1. Belum sepenuhnya terbangun kepercayaan masyarakat atas pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah melalui BAZNAS;

2. Masyarakat merasakan terlambatnya manfaat hasil-hasil kegiatan pembangunan;
3. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan hari-hari besar dan kegiatan keagamaan serta koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PATEN masih rendah;
5. Pengembangan dan pengendalian ekonomi daerah belum optimal;
6. Jumlah Persetujuan Kerjasama (MoU) antar daerah, baik dengan pemerintah daerah/Pusat/Instansi Vertikal dan dunia usaha masih terbatas;
7. Koordinasi Penyelesaian Batas Belum Optimal;
8. Sulit untuk mencapai target karena Pembahasan Peraturan Daerah melibatkan pihak terkait yaitu Perangkat Daerah Pemrakarsa dan DPRD;
9. Belum terpadunya penyelenggaraan reformasi birokrasi antar SKPD yang mengawal reformasi birokrasi;
10. Sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah belum terlaksana dengan baik;
11. Belum Optimalnya pelaksanaan kegiatan Kepala daerah/ wakil kepala daerah.

#### **E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2021.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2021 dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 beserta analisisnya

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan Saran.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Sekretariat Daerah mengampu urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi. Berdasar urusan dan program yang diampu, Sekretariat Daerah mendukung pencapaian visi misi Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu :

**Misi 1 “Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama”.** Misi ini merupakan upaya Pemerintah dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai ajaran agama berbasis keilmuan sehingga terjaga nuansa keindahan kehidupan beragama, ketertiban di lingkungan masyarakat, terpelihara kerukunan dan toleransi antar umat beragama serta kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

**Misi 5 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah”.** Misi ini tentang bagaimana upaya pemerintah dalam Meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik, kondisi keamanan dan politik yang kondusif serta pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan prima secara terpadu.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama sebanyak 5 ( Lima ) indikator.

**Tabel 3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Pemberdayaan lembaga keagamaan	Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan	Zakat yang disalurkan dari Baznas ke Fakir, Miskin, Amil, Muaf, Riqab, Gharim, Fisabilillah, Ibnu Sabil	$((\text{Realisasi Tahun Berjalan} - \text{Realisasi tahun awal renstra}) / (\text{Realisasi tahun awal renstra})) \times 100$	SK Penetapan IKU Sekretariat Daerah
2.	Pelestarian budaya keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	Kegiatan keagamaan yang di fasilitasi (jenis fasilitasi: menyediakan penceramah, Qori, Kelompok maulid habsy dan panitia pelaksana kegiatan)	Jumlah kegiatan keagamaan yang di fasilitasi dibagi dengan jumlah kegiatan keagamaan yang menjadi tanggung jawab Pemkab Banjar	SK Penetapan IKU Sekretariat Daerah
3.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase SKPD yang menginput RUP ke aplikasi SIRUP	Total SKPD yang menginput Rencana Umum Pengadaan ke Aplikasi SIRUP per 31 Januari pada tahun berjalan	Jumlah SKPD yang menginput RUP ke SIRUP dibagi Jumlah Total SKPD x 100 %	SK Penetapan IKU Sekretariat Daerah
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Kumulatif hasil Survey Kepuasan Masyarakat dari unit pelayanan publik	Nilai SKM unit penyelenggara pelayanan publik dikali 25	SK Penetapan IKU Sekretariat Daerah
5.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai/Skor EKPPD	Menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik	Penilaian yang diberikan oleh Kemendagri	SK Penetapan IKU Sekretariat Daerah

Sumber : Surat Keputusan IKU SKPD

## B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2021 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2016-2021. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2021 meliputi (1) sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui (1) indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2021		Anggaran Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
							Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,1	Nilai	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	%	31.647.849.837	Asisten III/ Bagian Umum/ Bagian Organisasi / Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan /Bagian Perencanaan dan Keuangan	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80,9	Nilai	317.274.600	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penunjang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	4	Dokumen	195.443.900	Bagian Perencanaan dan Keuangan / Kasubbag Perencanaan	Penunjang
						Jumlah dokumen anggaran dan belanja yang diverifikasi	4	Dokumen			Penunjang
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja Setda sesuai ketentuan	4	Dokumen	71.111.700	Bagian Perencanaan dan Keuangan / Kasubbag Pelaporan	Penunjang

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2021		Anggaran Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
							Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja	4	Dokumen	50.719.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan / Kasubbag Pelaporan	Penunjang
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah ASN Setda yang mendapat pelayanan gaji tunjangan dan tambahan penghasilan	100	Persen	14.303.324.912	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penunjang
				Persentase pelayanan penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlayani		100	Persen	Bagian Perencanaan dan Keuangan		Penunjang	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan	120	ASN	14.217.370.912	SETDA/ Bagian Perencanaan dan Keuangan / Kasubbag Keuangan	Penunjang
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Aturan Yang Berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel	32	Dokumen/Laporan	85.954.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan / Kasubbag Keuangan	Penunjang
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100	Persen	17.972.000	Bagian Hukum	Penunjang

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2021		Anggaran Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
							Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	80	Peserta	17.972.000	Bagian Hukum / Kasubbag Perundang-undangan	Penunjang
					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2.949.369.542</b>	<b>Bagian Umum</b>	<b>Penunjang</b>
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	33.942.000	Bagian Umum/ Kasubbag Rumah Tangga	Penunjang
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	1.368.721.000	Bagian Umum / Kasubbag Rumah Tangga	Penunjang
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	12	Bulan	21.000.000	Bagian Umum / Kasubbag Rumah Tangga	Penunjang
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	11	Bulan	1.525.706.542	SETDA/ Bagian Umum / Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Penunjang
					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>1.943.741.510</b>	<b>Bagian Umum</b>	Penunjang
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional	2	Unit	1.452.300.000	Bagian Umum / Kasubbag Pelengkapan	Penunjang

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2021		Anggaran Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
							Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pengadaan Mebel	Jumlah Aset Meubuler yang tercatat	12	Bulan	491.441.510	Bagian Umum/ Kasubbag Pelengkapan	Penunjang
					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>3.335.437.800</b>	<b>Bagian Umum</b>	Penunjang
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang masuk dan keluar	12	Bulan	41.240.000	Bagian Umum/ Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Penunjang
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah gedung yang Terlayani Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon	6	Gedung	1.184.840.000	SETDA/ Bagian Umum / Kasubbag Rumah Tangga	Penunjang
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	12	Bulan	207.250.000	Bagian Umum / Kasubbag Rumah Tangga	Penunjang
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan	1.902.107.800	Bagian Umum / Kasubbag Rumah Tangga	Penunjang
						Pelayanan Event Hari-Hari Besar yang Difasilitasi	90	Persen		Bagian Umum / Kasubbag Rumah Tangga	Penunjang
					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>3.966.597.309</b>	<b>Bagian Umum</b>	Penunjang

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2021		Anggaran Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
							Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Mobil Jabatan KDH/WKDH	4	Unit	956.230.000	Bagian Umum / Kasubbag Perlengkapan	Penunjang
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Layanan Perizinan Operasional Kendaraan Bermotor	115	Unit	839.020.000	Bagian Umum / Kasubbag Perlengkapan	Penunjang
				Jumlah Pelayanan Operasional Kendaraan Bermotor		115	Unit	Penunjang			
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bulan	60.000.000	Bagian Umum / Kasubbag Perlengkapan	Penunjang
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Bulan	1.299.227.309	Bagian Umum / Kasubbag Perlengkapan	Penunjang
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12	Bulan	410.000.000	Bagian Umum / Kasubbag Perlengkapan	Penunjang
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12	Bulan	402.120.000	Bagian Umum / Kasubbag Perlengkapan	Penunjang

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2021		Anggaran Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
							Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kantor atau Bangunan Lainnya						
					<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>959.349.564</b>	<b>Bagian Umum/ Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Penunjang
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Gaji & Tunjangan Kepala Daerah/ Wakil	12	Bulan	170.874.564	SETDA/ Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Kasubbag Keuangan	Penunjang
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	14	Stell	98.475.000	Bagian Umum / Kasubbag Perlengkapan	Penunjang
				umlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu KDH/WKDH		14	Stell	Bagian Umum / Kasubbag Perlengkapan		Penunjang	
					Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelayanan Pemeliharaan Jaminan Kesehatan KHD/WKDH	12	Bulan	90.000.000	Bagian Umum/ Kasubbag Perlengkapan	Penunjang
					Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Operasional KDH/WKDH	12	Bulan	600.000.000	SETDA/ Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan/ Kasubbag Komunikasi Pimpinan	Penunjang

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2021		Anggaran Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
							Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					<b>Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>1.778.677.800</b>	<b>Bagian Umum</b>	Penunjang
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Rumah Jabatan KDH/WKDH	12	Bulan	473.355.200	Bagian Umum/ Kasubbag Rumah Tangga	Penunjang
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Bupati	12	Bulan	243.695.600	Bagian Umum / Kasubbag Rumah Tangga	Penunjang
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	90	Persen	1.061.627.000	Bagian Umum / Kasubbag Rumah Tangga	Penunjang
						Tersedianya makanan dan minuman	12	Bulan		Bagian Umum / Kasubbag Rumah Tangga	Penunjang
					<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>789.291.000</b>	<b>Bagian Organisasi</b>	sasaran
					Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen/laporan Evaluasi kelembagaan yang telah disusun	1	Dokumen	75.205.000	Bagian Organisasi / Kasubbag Kelembagaan dan Analisa Jabatan	sasaran
						Jumlah Dokumen Penataan Sumber Daya Aparatur	1	Dokumen		Bagian Organisasi / Kasubbag Kelembagaan dan Analisa Jabatan	sasaran
					Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan	2	Dokumen	169.549.600	Bagian Organisasi / Kasubbag	sasaran

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2021		Anggaran Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
							Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						publik yang dievaluasi				Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Reformasi Birokrasi	1	Dokumen	544.536.400	Bagian Organisasi / Kasubbag Kinerja dan Reformasi Publik	sasaran
				Laporan hasil koordinasi		4	Laporan	Bagian Organisasi / Kasubbag Kinerja dan Reformasi Publik		sasaran	
					<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>1.286.813.800</b>	<b>Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Penunjang
				Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan Hari-hari Besar Nasional dan hari jadi yang diselenggarakan	10	Kegiatan	838.344.900	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan/Kasubbag Protokol	Penunjang	
					Jumlah Kegiatan Yang mendapat Pelayanan Keprotokolan	330	Kegiatan		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan/Kasubbag Protokol	Penunjang	
					Jumlah Pelayanan perjalanan dinas KDH/WKDH yang dilayani	12	Bulan		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan/Kasubbag Protokol	Penunjang	
				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Naskah Sambutan/Pidato	350	Naskah / Pidato	215.612.000	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan/ Kasubbag Komunikasi Pimpinan	Penunjang	

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2021		Anggaran Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan		
							Target	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						Jumlah Perjalanan Setda yang dilayani	12	Bulan		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan/ Kasubbag Komunikasi Pimpinan	Penunjang		
					Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi pimpinan	440	Dokumentasi	232.856.900	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan/ Kasubbag Dokumentasi Pimpinan	Penunjang		
2	Pemberdayaan lembaga keagamaan	Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan	11,13	%	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		100	Persen	6.311.818.368	Asisten I/ Bagian Pemerintahan / Bagian Kesejahteraan Rakyat / Bagian Hukum			
3	Pelestarian budaya keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	100	%									
4	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai LPPD	3,2000	Nilai									
					Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Keterisian Data Indikator Kinerja Kunci (IKK)	100	Persen	395.111.700	Bagian Pemerintahan	sasaran		
						Rata-Rata IKM Kecamatan	84	Nilai		Bagian Pemerintahan	sasaran		
						Persentase Permasalahan Segmen Batas Wilayah Yang Diselesaikan	62,25	Persen		Bagian Pemerintahan	sasaran		

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2021		Anggaran Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
							Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Lingkup Urusan Pemerintahan Yang disusun	1	Laporan	39.344.500	Bagian Pemerintahan / Kasubbag Administrasi Pemerintah	Penunjang
					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah item rupa bumi (toponomi) yang diverifikasi	1	Peta	269.245.700	Bagian Pemerintahan / Kasubbag Administrasi Kewilayahan	Penunjang
				Jumlah kesepakatan segmen batas wilayah yang dihasilkan dalam penetapan batas wilayah kecamatan dan kabupaten		3	Segmen Batas	Bagian Pemerintahan / Kasubbag Administrasi Kewilayahan		Penunjang	
				Jumlah Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		2	Laporan	Bagian Pemerintahan / Kasubbag Administrasi Kewilayahan		Penunjang	
				Jumlah laporan monev batas wilayah		4	Laporan	Bagian Pemerintahan / Kasubbag Administrasi Kewilayahan		Penunjang	
				Jumlah pembangunan patok batas wilayah		5	Patok	Bagian Pemerintahan / Kasubbag Administrasi Kewilayahan		Penunjang	

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2021		Anggaran Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
							Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Kelurahan	1	Laporan		Bagian Pemerintahan / Kasubbag Administrasi Kewilayahan	Penunjang
					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen LPPD dan EKPPD yang diverifikasi	2	Dokumen	86.521.500	Bagian Pemerintahan / Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah	sasaran
					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah ZIS yang terkumpul	699.840.000	Rp	5.610.184.268	Bagian Kesejahteraan Rakyat	sasaran
						Persentase Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi	100	Persen		Bagian Kesejahteraan Rakyat	sasaran
					Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Keagamaan & Hari-hari Besar Keagamaan	8	Kegiatan	3.648.157.400	Bagian Kesejahteraan Rakyat / Kasubbag Bina Mental	sasaran
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Lingkup Urusan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Disusun	7	Laporan	555.520.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat / Kasubbag Kesejahteraan Sosial	sasaran
						Jumlah laporan monev bantuan hibah	2	Laporan		Bagian Kesejahteraan Rakyat / Kasubbag Kesejahteraan Sosial	sasaran

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2021		Anggaran Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
							Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah UPZ yang dibina	34	UPZ		Bagian Kesejahteraan Rakyat / Kasubbag Kesejahteraan Sosial	sasaran
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Ulama & Toko Masyarakat yang mendapat Pelayanan Kesehatan	60	Orang	1.406.506.868	Bagian Kesejahteraan Rakyat / Kasubbag Kesejahteraan Masyarakat	sasaran
					Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase peraturan yang disahkan	100	%	280.963.600	Bagian Hukum	Penunjang
				Persentase Dokumen Peraturan Perundang-undangan Yang Dipublikasikan		100	%	Bagian Hukum		Penunjang	
				Persentase Terfasilitasi Permasalahan Hukum Yang Tertangani		100	%	Bagian Hukum		Penunjang	
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	Dokumen	82.813.600	Bagian Hukum/ Kasubbag Perundang-undangan	Penunjang	
					Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Berbentuk	550	Draft PHD		Bagian Hukum/ Kasubbag Perundang-undangan	Penunjang	

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2021		Anggaran Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
							Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Peraturan dan Penetapan					
					Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Laporan asistensi kontrak drafting kesepakatan bersama atau perjanjian	15	Laporan	127.671.300	Bagian Hukum/ Kasubbag Bantuan Hukum	Penunjang
					Jumlah Pemberian bantuan hukum dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara yang dihadapi Pemerintah Daerah	5	Perkara	Bagian Hukum/ Kasubbag Bantuan Hukum		Penunjang	
					Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	4	Dokumen	Bagian Hukum/ Kasubbag Bantuan Hukum		Penunjang	
					Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumentasi Produk Hukum Daerah	500	Dokumentasi	70.478.700	Bagian Hukum/ Kasubbag Dokumentasi dan Informasi	Penunjang
					Jumlah Media Publikasi	1	Website	Bagian Hukum/ Kasubbag Dokumentasi dan Informasi		Penunjang	
					Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan	100	Persen	25.558.800	Bagian Pemerintahan	Penunjang

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2021		Anggaran Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
							Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						<b>Pihak Terkait Yang ditindaklanjuti</b>					
					Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi dan koordinasi kerjasama daerah	100	Persen	25.558.800	Bagian Pemerintahan /Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah	Penunjang
						Jumlah laporan monev kerjasama antar daerah	1	Laporan		Bagian Pemerintahan /Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah	Penunjang
5	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase SKPD Yang menginput RUP ke aplikasi SIRUP	100	%	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>		100	Persen	1.034.866.300	<b>Asisten II/ Bagian Perekonomian dan SDA / Bagian Pengadaan Barang dan Jasa / Bagian Administrasi Pembangunan</b>	Penunjang
					<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Persentase BUMD yang sehat</b>	100	Persen	233.610.100	<b>Bagian Perekonomian dan SDA</b>	
					Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD dan BLUD yang difasilitasi dan dievaluasi	13	BUMND/BLUD	168.143.000	Bagian Perekonomian dan SDA/ Kassubag BUMD dan BLUD	Penunjang
					Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan TPID yang disusun	4	Laporan	65.467.100	Bagian Perekonomian dan SDA / Kassubag Perekonomian	Penunjang

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2021		Anggaran Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
							Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase Administrasi Pembangunan yang dibuat</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>188.149.700</b>	<b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>	Penunjang
					Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Laporan Penyusunan Kegiatan Pembangunan	1	Laporan	23.219.300	Bagian Administrasi Pembangunan/ Kassubag Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan	Penunjang
					Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Pengendalian Pembangunan	4	Laporan	27.675.400	Bagian Administrasi Pembangunan/ Kassubag Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan	Penunjang
					Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	4	Laporan	137.255.000	Bagian Administrasi Pembangunan / Kasubbag Pengendalian Program	Penunjang
					<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase paket Pengadaan barang dan Jasa yang tepat waktu</b>	<b>92</b>	<b>Persen</b>	<b>563.418.100</b>	<b>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</b>	sasaran
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Kontrak yang sesuai Ketentuan	4	Laporan	10.308.300	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/ Kasubag Pengelolaan Barang dan Jasa	sasaran
						Jumlah Laporan Paket lelang yang disusun sesuai ketentuan	4	Laporan		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/ Kasubag	sasaran

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2021		Anggaran Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
							Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Pengelolaan Barang dan Jasa	
					Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah SKPD yang menyampaikan dan mengumumkan RUP Tepat Waktu	54	SKPD	495.348.200	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/ Kasubbag LPSE	sasaran
					Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelolaan PBJ yang mengikuti Peningkatan Kapasitas	54	PBJ	57.761.600	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/ Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	sasaran
					<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase kebijakan lingkup urusan perekonomian yang terlaksana</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>49.688.400</b>	<b>Bagian Perekonomian dan SDA</b>	Penunjang
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Laporan Kegiatan pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam	2	Laporan	12.449.400	Bagian Perekonomian dan SDA/ Kasubbag Sumber Daya Alam	Penunjang
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Pemantauan dan evaluasi energi dan air	2	Laporan	37.239.000	Bagian Perekonomian dan SDA /Kasubbag Sumber Daya Alam	Penunjang

Sumber : dokumen Perjanjian Kinerja

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

##### A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2021

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2021.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100 \%$$

Sekretariat Daerah Kab. Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kab. Banjar tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 5 Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 100%	Berhasil	Hijau
2	70% < 100%	Cukup Berhasil	Biru
3	40% < 70%	Kurang Berhasil	Kuning
4	<40%	Tidak Berhasil	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kab. Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kab. Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

Tabel 6 Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realisasi	Capaian	Predikat
			Satuan	Tahun 2021		(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemberdayaan Lembaga Keagamaan	Persentase Peningkatan dana zakat yang tersalurkan	((Realisasi Tahun Berjalan - Realisasi Tahun awal renstra) / (Realisasi Tahun awal renstra)) x 100	%	11,13	507	4.555	Berhasil
Meningkatnya pengelolaan lembaga zakat	Jumlah ZIS yang terkumpul	((Target penerimaan ZIS di tahun berjalan dikurang penerimaan ZIS tahun sebelumnya) dibagi realisasi ZIS tahun sebelumnya dikali 100)	Rp	Rp699.840.000	1.975.238.029	282	Berhasil
Pelestarian Budaya Keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	Jumlah kegiatan keagamaan yang di fasilitasi dibagi dengan jumlah kegiatan keagamaan yang menjadi tanggung	%	100	100	100	Berhasil

Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realisasi	Capaian	Predikat
			Satuan	Tahun 2021		(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		jawab pemkab banjar					
Meningkatnya kegiatan keagamaan yang diperingati	Persentase kegiatan keagamaan yang diperingati	Jumlah hari-hari besar kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dibagi dengan Jumlah hari-hari besar kegiatan keagamaan di kali 100	%	100	100	100	Berhasil
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase SKPD Yang menginput RUP ke aplikasi SIRUP	Jumlah SKPD yang menginput RUP ke SIRUP dibagi Jumlah Total SKPD x 100 %	%	100	100	100	Berhasil
Meningkatnya paket pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu	Paket lelang PBJ yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu dibagi dengan jumlah paket lelang yang ada di SIRUP kali 100	%	92	100	109	Berhasil
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai SKM unit penyelenggara pelayanan publik dikali 25	%	82,1	83,43	101,62	Berhasil
Meningkatnya Prosentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumentasi road map reformasi birokrasi	Prosentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumentasi road map reformasi birokrasi	Jumlah Kegiatan yang ada didalam Dokumen Roadmap Birokrasi yang telah dilaksanakan dibagi Jumlah kegiatan yang direncanakan didalam Dokumen Roadmap Birokrasi kali 100	%	100	100	100	Berhasil
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai/Skor EKPPD	Penilaian yang diberikan oleh Kemendagri	Nilai	3.2000	3.5069	109,59	Berhasil

Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realisasi	Capaian	Predikat
			Satuan	Tahun 2021		(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Persentase keterisian data Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan rata-rata ikm kecamatan	Persentase keterisian data Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Jumlah IKK yang terisi dibagi jumlah IKK dikali 100	%	100	100	100	Berhasil
	Rata-rata IKM Kecamatan	Jumlah rata-rata SKM seluruh kecamatan dibagi Standar IKM Kabupaten tahun berjalan kali 100	%	84	85,46	101,74	Berhasil

Grafik 1 Capaian Kinerja Sasaran



Dari Grafik diatas dapat dijelaskan :

1. Sasaran Pemberdayaan lembaga keagamaan dengan indikator kinerja sasaran persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan menggunakan cara perhitungan realisasi tahun berjalan dikurang dengan realisasi tahun awal renstra dibagi realisasi tahun awal renstra dikali 100, pada tahun 2021 realisasi penyaluran dana zakat adalah 2.273.721.850 sedangkan realisasi penyaluran dana zakat pada tahun awal renstra adalah 374.281.000 apabila di persentasekan maka realisasi kinerja sasaran persentase dana zakat yang tersalurkan adalah 507 % dari target 11,13 % maka capaian sasaran pemberdayaan lembaga keagamaan dengan indikator kinerja persentase

dana zakat yang tersalurkan adalah 4.555%, Predikat capaian kinerja ini adalah berhasil;

2. Sasaran pelestarian Budaya Keagamaan dengan indikator kinerja sasaran persentase kegiatan keagamaan yang terfasilitasi menggunakan cara perhitungan Jumlah kegiatan keagamaan yang di fasilitasi dibagi dengan jumlah kegiatan keagamaan yang menjadi tanggung jawab pemkab banjar, pada tahun 2021 realisasi kegiatan keagamaan yang terfasilitasi adalah 4 kegiatan dengan target kinerja 100 % realisasi kinerjanya apabila di persentasekan adalah 100 % maka capaian sasaran pelestarian budaya keagamaan dengan indikator kinerja persentase kegiatan keagamaan yang terfasilitasi adalah 100%, Predikat capaian kinerja ini adalah berhasil;
3. Sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik dengan indikator kinerja Persentase SKPD Yang menginput RUP ke aplikasi SIRUP menggunakan cara perhitungan Jumlah SKPD yang menginput RUP ke SIRUP dibagi Jumlah Total SKPD dikali 100 %, pada tahun 2021 realisasi kinerja SKPD yang menginput RUP ke aplikasi SIRUP adalah 54 SKPD dari total 54 SKPD (termasuk kecamatan) yang ada di Kabupaten Banjar apabila di persentasekan maka realisasi kinerjanya adalah 100% dengan target kinerja 100% sehingga capaiannya kinerjanya adalah 100%, Predikat capaian kinerja ini adalah berhasil;
4. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan cara perhitungan Nilai SKM unit penyelenggara pelayanan publik dikali 25, Survey kepuasan masyarakat dilakukan unit kerja penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Banjar yaitu 7 SKPD, 20 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 24 Puskesmas, pada tahun 2021 realisasi kinerja indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah 83,43 dari target 82,1 sehingga mendapatkan capaian sebesar 101,62 %, Predikat capaian ini adalah berhasil;
5. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Nilai/Skor EKPPD menggunakan cara perhitungan Penilaian yang diberikan oleh Kemendagri, pada tahun 2021 nilai/skor EKPPD yang di dapatkan oleh Kabupaten Banjar adalah 3.5069 dengan target 3.2000 apabila dipersentasekan maka capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah adalah 109,59%, Predikat capaian ini adalah cukup berhasil.

## **A.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA.**

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan bagian dari kinerja strategis (SKPD) sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2021 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 7 Perbandingan Realisasi/ Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
Indikator Sebelum Perubahan															
1	Jumlah dana BAZ yang tersalurkan	Jumlah dana BAZ yang disalurkan kepada 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat menurut syariat	Rupiah	-	-	374.281.000	156%	779.246.170	278%	-	-	-	-	-	-
2	Opini Akuntan Publik	Laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan	WTP	-	-	WTP	100%	WTP	100%	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi	Tidak Menjadi Indikator lagi

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
3	Persentase Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan	Realisasi pelaksanaan kegiatan baik secara keuangan maupun fisik yang dilaporkan setiap SKPD dibandingkan dengan rencana yang akan dicapai dikali 100	Persentase	90	90	Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi	
4	Persentase Kepatuhan SKPD/entitas terhadap Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Kepatuhan SKPD/entitas terhadap Peraturan Perundang - Undangan dibandingkan dengan jumlah seluruh SKPD dikali 100	Persentase	-	-	100	164%	83,33	109%	Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi	

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
5	Persentase Peraturan Daerah yang dibuat	Jumlah produk hukum daerah bersifat ketetapan, yang dibuat yang sesuai dan selaras dengan Peraturan Perundang - Undangan yang lebih tinggi dibagi dengan jumlah produk hukum yang dibuat dikalikan 100%	Persentase	95	95	99,34	142%	75	100%	Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi	
6	Persentase SPM yang terpenuhi	Jumlah SKPD yang menginput SPM di bagi jumlah SKPD pelaksana SPM dikalikan 100%	Persentase	100	100	73,53	86,50%	90	100%	Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi	
7	Persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja	Jumlah SKPD yang sesuai beban kerja dibagi jumlah SKPD dikalikan 100%	Persentase	-	-	50	100%	75	100%	Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi	

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
8	Indeks kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang diukur melalui Survey yang dilakukan masyarakat	Nilai/Skor	79,4	97,4	78,62	96,23%	81,1	99,02	81,96	100,07%	81,96	99,94 %	81,96	99,94 %
9	Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Optimalisasi Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang dikecamatan dibagi jumlah survey kepuasan masyarakat dikalikan 100	Persentase	10	100	100	100%	100	333%	Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi		Tidak Menjadi Indikator lagi	

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
Indikator Sesudah Perubahan															
1	Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan	((Realisasi Tahun Berjalan – Realisasi Awal Tahun Renstra) / (Realisasi Awal Tahun Renstra)) x 100	Persentase	-	-	-	-	-	-	113,12%	1140%	329,00 %	3,222 %	507%	4.555 %
2	Persentase kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	Jumlah kegiatan keagamaan yang di fasilitasi dibagi dengan jumlah kegiatan keagamaan yang menjadi tanggung jawab pemkab banjar	Persentase	-	-	-	-	-	-	100%	125%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase SKPD Yang menginput RUP ke aplikasi SIRUP	Jumlah SKPD yang menginput RUP ke SIRUP dibagi Jumlah Total SKPD x 100 %	Persentase	-	-	-	-	-	-	96%	120%	96%	107%	100%	100%

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

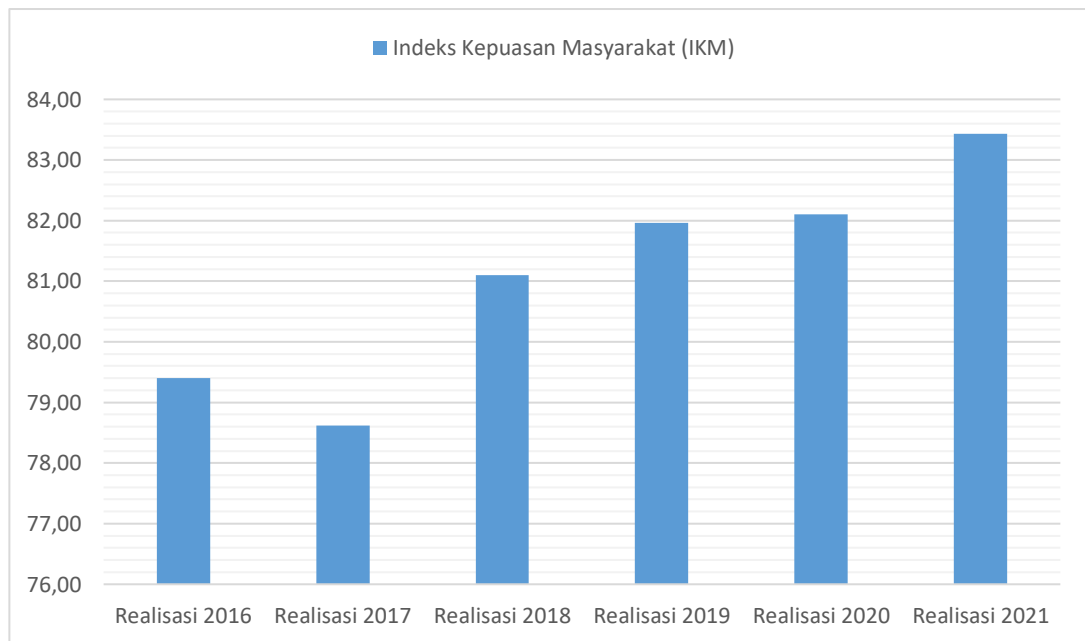
## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai SKM unit penyelenggara pelayanan publik dikali 25	Nilai	-	-	-	-	-	-	81,96%	100,07%	82,44%	100,53 %	83,43 %	101,62 %
5	Nilai/Skor EKPPD	Penilaian yang diberikan oleh Kemendagri	Nilai/Skor	-	-	-	-	-	-	3.1589	99,34%	3.5069	109,93 %	3.5069	109,59 %

Sumber : Bagian-bagian Sekretariat Daerah

Setelah perubahan rencana strategis hanya 1 (satu) indikator sasaran yang masih di gunakan yaitu sasaran Indeks kepuasan masyarakat, Perbandingan Realisasi capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

**Grafik 2 Perbandingan Realisasi / Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya**



Mengalami peningkatan sebesar sebesar 0,99 dari 82,44 menjadi 83,43. Hal ini menunjukkan secara keseluruhan capaian IKM pada unit pelayanan mengalami kenaikan dan hampir merata pada semua unit. Secara kelompok unit pelayanan, 1 kelompok mengalami yang mengalami penurunan yakni pada kelurahan, dan 3 kelompok mengalami kenaikan yakni perangkat daerah, puskesmas dan kecamatan. Sebagaimana data pada tabel berikut :

**Tabel 8 Kenaikan/Penurunan Capaian IKM Kelompok Unit Pelayanan Tahun 2021 dibandingkan Dengan Tahun 2020**

No	Kelompok Unit pelayanan	Rata-rata IKM 2020	Rata-rata IKM 2021	Kenaikan/penurunan	ket
1.	Perangkat daerah	81,65	82,63	+0,98	
2.	Perangkat daerah/ Kecamatan	84,08	85,46	+1,38	
3.	Kelurahan	85,41	85,28	-0,13	

4.	Puskesmas	80,57	81,89	+1,32	
----	-----------	-------	-------	-------	--

Terjadi penurunan yang tidak terlalu besar pada kelompok unit pelayanan Kelurahan yang sedikit banyak dipengaruhi terjadinya lanjutan Pandemi Covid-19 ditahun 2021. Karena kelurahan merupakan salah satu ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat. Penurunan ini dipengaruhi pula upaya peningkatan vaksinasi covid-19 kepada semua masyarakat yang ditekankan kepada pemerintah kelurahan dan desa sebagai unsur pemerintahan terendah. Upaya yang maksimal dalam upaya penanganan vaksinasi ini yang membawa pengaruh pada pelayanan pada kelurahan yang berkurang karena tenaga pegawai pada kelurahan sebagian besar dijadikan petugas penanganan vaksinasi. Akan tetapi secara kinerja dan pelayanan hal ini telah dilaksanakan maksimal dan semua pegawai berkinerja dengan baik untuk menjalankan program pemerintah agar dapat berjalan dengan baik dan target vaksinasi dapat tercapai.

Sementara untuk unit pelayanan lainnya keseluruhan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik semakin baik setiap tahun, dengan adanya upaya dan kerjasama yang solid antara pimpinan sampai ke tenaga pelayanan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada penerima layanan terutama masyarakat.

**Tabel 9 Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan PD Beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2016-2021**

PD : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
<b>Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama</b>	Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	Angka Kriminalitas					Angka	11,16	10,17	Rp2.105.424.640	9,4	Rp2.402.238.300	8,44	Rp2.765.073.950	8,44	Rp2.765.073.950	
			Pemberdayaan lembaga keagamaan	Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan			Persentase	-	9,92%	Rp92.306.000	10,21%	Rp144.651.900	11,13%	Rp168.849.600	11,13%	Rp168.849.600	
					Program Peningkatan pengelolaan lembaga zakat	Jumlah ZIS yang terkumpul	Rupiah	Rp485.978.246	Rp583.200.000	Rp92.306.000	Rp641.520.000	Rp144.651.900	Rp699.840.000	Rp168.849.600	Rp699.840.000	Rp168.849.600	

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah	Jumlah laporan monev bantuan hibah	Laporan	-	2 Laporan	Rp10.000.000	2 Laporan	Rp50.000.000	2 Laporan	Rp60.000.000	2 Laporan	Rp60.000.000	Kab. Banjar
					Pengembangan Lembaga Zakat	Jumlah UPZ yang dibina	Unit	-	34 Unit	Rp82.306.000	34 Unit	Rp94.651.900	34 Unit	Rp108.849.600	34 Unit	Rp108.849.600	Kab. Banjar
			Pelestarian budaya keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan yang terfasilitasi			Persentase	-	80%	Rp2.013.118.640	90%	Rp2.257.586.400	100,00%	Rp2.596.224.350	100,00%	Rp2.596.224.350	
					Program penunjang penyelenggaraan hari-hari besar	Persentase kegiatan keagamaan yang diperingati	Persentase	100%	100%	Rp2.013.118.640	100%	Rp2.257.586.400	100%	Rp2.596.224.350	100%	Rp2.596.224.350	
					Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan hasil koordinasi lingkup urusan kesejahteraan sosial	Laporan	-	7 Laporan	Rp174.100.000	7 Laporan	Rp142.715.000	7 Laporan	Rp164.122.250	7 Laporan	Rp164.122.250	Kab. Banjar

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						kemasyarakatan yang disusun											
						Penunjang Pelayanan Kesehatan Ulama dan Tokoh Masyarakat	Orang	-	50 Orang	Rp462.368.700	60 Orang	Rp531.724.000	60 Orang	Rp611.482.600	60 Orang	Rp611.482.600	Kab. Banjar
						Penunjang Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Kali	-	13 Kali	Rp1.376.649.940	13 Kali	Rp1.583.147.400	13 Kali	Rp1.820.619.500	13 Kali	Rp1.820.619.500	Kab. Banjar
<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah</b>	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan					Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	64,61	65	Rp23.270.731.928	67,5	Rp26.633.966.490	70	Rp31.128.981.580	70	Rp31.128.981.580	

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase SKPD Yang menginput RUP ke aplikasi SIRUP			Persentase	-	80%	Rp1.545.271.300	90%	Rp1.798.519.000	100%	Rp2.093.775.650	100%	Rp2.093.775.650	
					Program pengadaan barang dan jasa	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu	Persentase	76,51%	90,00 %	Rp1.545.271.300	91,00 %	Rp1.798.519.000	92,00 %	Rp2.093.775.650	92,00 %	Rp2.093.775.650	
					Koordinasi kebijakan pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan koordinasi lingkup Infrastruktur dan LH yang diasistensi / mediasi	Laporan	-	4 Laporan	Rp102.200.000	4 Laporan	Rp117.530.000	4 Laporan	Rp135.159.500	4 Laporan	Rp135.159.500	Kab.Banjar
					Pengendalian dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pelaksanaan kontrak yang sesuai ketentuan	Laporan	-	4 Laporan	Rp197.000.000	4 Laporan	Rp226.665.000	4 Laporan	Rp260.664.750	4 Laporan	Rp260.664.750	Kab.Banjar

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah SKPD Yang menyampaikan dan mengumumkan RUP tepat waktu	SKPD	-	54 SKPD	Rp731.471.300	54 SKPD	Rp841.192.000	54 SKPD	Rp967.370.800	54 SKPD	Rp967.370.800	Kab.Banjar
					Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah laporan Paket Lelang yang disusun sesuai ketentuan	Laporan	-	4 Laporan	Rp219.400.000	4 Laporan	Rp258.892.000	4 Laporan	Rp305.492.600	4 Laporan	Rp305.492.600	Kab.Banjar
					Pengembangan Sumber Daya Layanan Pengadaan	Jumlah Pengelola PBJ yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang	-	72 Orang	Rp295.200.000	85 Orang	Rp354.240.000	93 Orang	Rp425.088.000	93 Orang	Rp425.088.000	Dalam dan Luar Daerah
			Meningkatkan	Indeks Kepuasan			Indeks	-	81,9	Rp1.407.849.200	82	Rp1.689.419.160	82,1	Rp2.027.302.992	82,1	Rp2.027.302.992	

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			kualitas pelayanan publik	Masyarakat (IKM)	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan pembinaan kelembagaan	Prosentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumentasi roadmap reformasi birokrasi	Persentase	85,71%	100%	Rp1.407.849.200	100%	Rp1.689.419.160	100%	Rp2.027.302.992	100%	Rp2.027.302.992	
					Peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara	Jumlah dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan publik yang dievaluasi	Dokumen	-	8 Dokumen	Rp329.304.000	8 Dokumen	Rp395.164.800	8 Dokumen	Rp474.197.760	8 Dokumen	Rp474.197.760	Kab. Banjar
					Pembinaan Kelembagaan	Jumlah dokumen / laporan evaluasi kelembagaan yang telah disusun	Dokumen	-	3 Dokumen	Rp468.255.000	3 Dokumen	Rp561.906.000	3 Dokumen	Rp674.287.200	3 Dokumen	Rp674.287.200	Kab. Banjar
					Penataan Manajemen	Jumlah dokumen penataan sumber	Dokumen	-	4 Dokumen	Rp424.887.800	4 Dokumen	Rp509.865.360	4 Dokumen	Rp611.838.432	4 Dokumen	Rp611.838.432	Kab. Banjar

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Sumber Daya Aparatur	daya aparatur											
					Koordinasi akuntabilitas kinerja pemerintah	Laporan hasil koordinasi	Laporan	-	2 Laporan	Rp185.402.400	3 Laporan	Rp222.483.000	4 Laporan	Rp266.979.600	4 Laporan	Rp266.979.600	Kab. Banjar
			Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai/Skor EKPPD			Nilai	3,1797	3,1800	Rp20.317.611.428	3,1900	Rp23.146.028.330	3,2000	Rp27.007.902.938	3,2000	Rp27.007.902.938	
					Program koordinasi dan fasilitasi perekonomian dan investasi daerah	Persentase BUMD yang sehat	Persentase	100%	100%	Rp292.066.200	100%	Rp298.666.200	100%	Rp328.666.200	100%	Rp328.666.200	
						Persentase kebijakan lingkup urusan perekonomian yang terlaksana	Persentase	100%	100%	Rp912.065.000	100%	Rp949.121.600	100%	Rp1.010.765.600	100%	Rp1.010.765.600	
					Pembinaan BUMD	Jumlah BUMD yang dibina	BUMD	-	9 BUMD	Rp100.000.000	9 BUMD	Rp173.600.000	9 BUMD	Rp203.600.000	9 BUMD	Rp203.600.000	Kab. Banjar

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Fasilitasi Pengembangan BUMD	Jumlah kebijakan pengembangan BUMD	Kebijakan	-	2 Kebijakan	Rp192.066.200	2 Kebijakan	Rp125.066.200	2 Kebijakan	Rp125.066.200	2 Kebijakan	Rp125.066.200	Kab. Banjar
					Koordinasi Program Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah laporan TPID yang disusun	Laporan	-	4 Laporan	Rp337.548.800	4 Laporan	Rp371.455.400	4 Laporan	Rp404.349.400	4 Laporan	Rp404.349.400	Kab. Banjar
					Penyusunan Dokumen Informasi Perekonomian Daerah	Jumlah Dokumen informasi perekonomian daerah yang dibuat	Dokumen	-	1 Dokumen	Rp165.216.200	1 Dokumen	Rp186.216.200	1 Dokumen	Rp196.716.200	1 Dokumen	Rp196.716.200	Kab. Banjar
					Koordinasi Kebijakan Perekonomian daerah	Jumlah laporan koordinasi lingkup urusan perekonomian yang disusun	Laporan	-	4 Laporan	Rp409.300.000	4 Laporan	Rp391.450.000	4 Laporan	Rp409.700.000	4 Laporan	Rp409.700.000	Dalam dan Luar Daerah

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	-	78,2	Rp602.433.000	79,5	Rp692.797.700	80,9	Rp796.717.600	80,9	Rp796.717.600	
					Implementasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	-	4 Dokumen	Rp253.548.500	4 Dokumen	291.580.700	4 Dokumen	335.317.900	4 Dokumen	335.317.900	Setda Banjar
					Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan	Jumlah dokumen anggaran dan belanja yang diverifikasi dan	Dokumen	-	4 Dokumen	Rp34.147.000	4 Dokumen	Rp39.269.000	4 Dokumen	Rp45.159.400	4 Dokumen	Rp45.159.400	Setda Banjar

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Belanja SKPD												
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja Setda sesuai ketentuan	Dokumen	-	4 Dokumen	Rp78.147.000	4 Dokumen	Rp89.869.000	4 Dokumen	Rp103.349.400	4 Dokumen	Rp103.349.400	Setda Banjar
					Monitoring dan Evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi	Laporan	-	4 Laporan	Rp236.590.500	4 Laporan	Rp272.079.000	4 Laporan	Rp312.890.900	4 Laporan	Rp312.890.900	Kab. Banjar
					Program penunjang penyelenggaraan hari-hari besar	Persentase hari-hari besar nasional yang diperingati	Persentase	100%	100%	Rp607.723.000	100%	Rp698.881.450	100%	Rp803.713.668	100%	Rp803.713.668	
					Koordinasi Penyelenggaraan Hari-hari	Jumlah koordinasi hari-hari besar nasional	Event	-	6 Event	Rp162.600.000	6 Event	Rp186.990.000	6 Event	Rp215.038.500	6 Event	Rp215.038.500	Kab. Banjar

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Besar Nasional	sesuai bidang tugasnya											
					Pembentukan Panitia Terpadu	Jumlah kegiatan kepanitiaan terpadu	Kali	-	2 Kali	Rp445.123.000	2 Kali	Rp511.891.450	2 Kali	Rp588.675.168	2 Kali	Rp58.8675.168	Kab. Banjar
					Program penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase keterisian data Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Persentase	100%	100%	Rp249.826.800	100%	Rp287.300.800	100%	Rp351.846.525	100%	Rp35.1846.525	
						Rata-rata IKM Kecamatan	Persentase	76,83%	82%	Rp518.751.360	83%	Rp596.564.000	84%	Rp686.048.700	84%	Rp68.6048.700	
					Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Laporan	-	3 Laporan	Rp518.751.360	3 Laporan	Rp596.564.000	3 Laporan	Rp686.048.700	3 Laporan	Rp68.6048.700	Kab. Banjar

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Koordinasi Penyusunan LPPD dan EKPPD	Jumlah dokumen LPPD dan EKPPD yang diverifikasi	Dokumen	-	2 Dokumen	Rp186.526.800	2 Dokumen	Rp214.505.800	2 Dokumen	Rp268.132.275	2 Dokumen	Rp268.132.275	Kab. Banjar
					Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah laporan koordinasi lingkup urusan pemerintahan yang disusun	Laporan	-	1 Laporan	Rp63.300.000	2 Laporan	Rp72.795.000	3 Laporan	Rp83.714.250	3 Laporan	Rp83.714.250	Kab. Banjar
					Program kerjasama pembangunan	Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Terkait Yang Ditindaklanjuti	Persentase	100%	100%	Rp56.526.600	100%	Rp65.005.600	100%	Rp74.756.400	100%	Rp74.756.400	
					Koordinasi Kerjasama Pembangunan	Jumlah MoU pemerintah daerah dengan lembaga/	MoU	-	10 MoU	Rp33.526.600	12 MoU	Rp38.555.600	14 MoU	Rp44.338.900	14 MoU	Rp44.338.900	Kab. Banjar

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Antar Daerah	pihak terkait lainnya											
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monev kerjasama antar daerah	Laporan	-	4 Laporan	Rp23.000.000	4 Laporan	Rp26.450.000	4 Laporan	Rp30.417.500	4 Laporan	Rp30.417.500	Kab. Banjar
					Program penegakan batas daerah	Persentase Permasalahan Segmen Batas Wilayah Yang Diselesaikan	Persentase	25,53%	42,25%	Rp407.002.000	52,25%	Rp513.632.700	62,25%	Rp621.444.375	62,25%	Rp621.444.375	
					Pembangunan dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah	Jumlah pembangunan patok batas wilayah	Patok	-	10 Patok	Rp74.500.000	10 Patok	Rp85.675.000	10 Patok	Rp98.526.250	10 Patok	Rp98.526.250	Kab. Banjar

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Fasilitasi Penegasan Batas Daerah	Jumlah kesepakatan titik batas wilayah yang dihasilkan dalam penetapan batas wilayah kabupaten / kecamatan	Kesepakatan	-	1 Kesepakatan	Rp227.902.000	5 Kesepakatan	Rp307.667.700	5 Kesepakatan	Rp384.584.625	5 Kesepakatan	Rp384.584.625	Kab. Banjar
					Pembuatan Peta Rupa Bumi	Jumlah item rupa bumi (toponomi) yang diverifikasi	Dokumen	-	1 Dokumen	Rp37.500.000	1 Dokumen	Rp43.125.000	1 Dokumen	Rp49.593.750	1 Dokumen	Rp49.593.750	Kecamatan
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monev batas wilayah	Laporan	-	4 Laporan	Rp67.100.000	4 Laporan	Rp77.165.000	4 Laporan	88.739.750	4 Laporan	88.739.750	Kab. Banjar
					Program penataan perundang-	Persentase Peraturan Yang Disahkan	Persentase	100%	100%	Rp410.497.800	100%	Rp533.717.200	100%	Rp693.741.300	100%	Rp693.741.300	

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					undangan	Persentase Dokumen Peraturan Perundangan Yang Dipublikasikan	Persentase	100%	100%	Rp355.120.000	100%	Rp660.000.000	100%	Rp825.000.000	100%	Rp825.000.000	
						Persentase Terfasilitasi Permasalahan Hukum Yang Tertangani	Persentase	100%	100%	Rp369.180.000	100%	Rp461.475.000	100%	Rp576.843.750	100%	Rp576.843.750	
					Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangan	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan penetapan	Draf PHD	-	501 Draf PHD	Rp342.247.800	501 Draf PHD	Rp444.992.200	501 Draf PHD	Rp578.398.800	501 Draf PHD	Rp578.398.800	Kab. Banjar

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Penyusunan dan Evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen Propemperda	Dokumen	-	1 Dokumen	Rp68.250.000	1 Dokumen	Rp88.725.000	1 Dokumen	Rp115.342.500	1 Dokumen	Rp115.342.500	Kab. Banjar
					Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumentasi produk hukum daerah	Dokumen	-	501 Dokumen	Rp148.270.000	501 Dokumen	Rp186.000.000	501 Dokumen	Rp232.500.000	501 Dokumen	Rp232.500.000	Kab. Banjar
					Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi	Orang	-	160 Orang	Rp57.370.000	800 Orang	Rp287.000.000	800 Orang	Rp358.750.000	800 Orang	Rp358.750.000	Kab. Banjar
					Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah media publikasi	Website	-	1 Website	Rp149.480.000	1 Website	Rp187.000.000	1 Website	Rp233.750.000	1 Website	Rp233.750.000	Kab. Banjar

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Pembinaan Kerjasama Bantuan Hukum	Jumlah pemberian bantuan hukum	Perkara	-	5 Perkara	Rp149.960.000	5 Perkara	Rp187.450.000	5 Perkara	Rp234.312.500	5 Perkara	Rp234.312.500	Kab. Banjar
					Koordinasi Hak Asasi Manusia	Jumlah laporan HAM	Dokumen	-	5 Dokumen	Rp101.200.000	5 Dokumen	Rp126.500.000	5 Dokumen	Rp158.125.000	5 Dokumen	Rp158.125.000	Kab. Banjar
					Fasilitasi Penyusunan Kesepakatan Kerjasama	Jumlah laporan asistensi contract drafting kesepakatan bersama/perjanjian	Laporan	-	12 Laporan	Rp118.020.000	12 Laporan	Rp147.525.000	12 Laporan	Rp184.406.250	12 Laporan	Rp184.406.250	Kab. Banjar
					Program peningkatan pelayanan kedinasaan	Persentase pelayanan kedinasaan KDH dan WKDH	Persentase	100%	100%	Rp3.451.986.000	100%	Rp3.996.453.200	100%	Rp4.635.220.800	100%	Rp4.635.220.800	

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					n kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase pelayanan keprotokolanan dan kehumasan atas kegiatan pemerintahan daerah	Persentase	90%	90%	Rp1.008.771.200	95%	Rp1.059.209.760	99%	Rp1.112.170.248	99%	Rp1.112.170.248	
					Persentase Pelayanan Kantor Perwakilan terhadap KDH/WKDH/Ketua DPRD	Persentase	100%	100%	Rp1.152.880.000	100%	Rp1.127.328.000	100%	Rp1.352.793.600	100%	Rp1.352.793.600		
					Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Kementrian/Lembaga Pemerintah NonDepa	Jumlah pelayanan tamu	Tahun	-	1 Tahun	Rp75.000.000	1 Tahun	Rp90.000.000	1 Tahun	Rp108.000.000	1 Tahun	Rp108.000.000	Kab. Banjar

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					rtemen/ Luar Negeri												
					Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Jumlah perjalanan dinas Setda yang dilayani	Tahun	-	1 Tahun	Rp300.000.000	1 Tahun	Rp330.000.000	1 Tahun	Rp363.000.000	1 Tahun	Rp363.000.000	Dalam daerah
					Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya	Jumlah perjalanan dinas KDH dan WKDH yang dilayani	Tahun	-	1 Tahun	Rp1.159.300.000	1 Tahun	Rp1.275.230.000	1 Tahun	Rp1.402.753.000	1 Tahun	Rp1.402.753.000	Luar daerah
					Koordinasi Pelayanan Kedinasaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pelayanan kedinasaan dan event hari-hari besar nasional yang difasilitasi	Event	-	7 event	Rp1.917.686.000	7 event	Rp2.301.223.200	7 event	Rp2.761.467.800	1 Tahun	Rp2.761.467.800	Kab. Banjar

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Penyediaan Layanan Keptokolan	Jumlah Kegiatan Yang Mendapat Pelayanan Keptokolan	Kegiatan	-	300 Kegiatan	Rp171.000.000	315 Kegiatan	Rp179.550.000	330 Kegiatan	Rp188.527.500	330 Kegiatan	Rp188.527.500	Dalam dan Luar Daerah
					Penyediaan Layanan Kehumasan	Jumlah laporan kehumasan	Laporan	-	400 Laporan	Rp832.771.200	420 Laporan	Rp874.409.760	440 Laporan	Rp918.130.248	440 Laporan	Rp918.130.248	Dalam dan Luar Daerah
					Koordinasi Urusan Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan koordinasi	Laporan	-	1 Laporan	Rp5.000.000	1 Laporan	Rp5.250.000	1 Laporan	Rp5.512.500	1 Laporan	Rp5.512.500	Kab. Banjar
					Penunjang Pelayanan Kantor Perwakilan	Terselenggaranya pelayanan kantor perwakilan	Kantor	-	1 Kantor	Rp1.152.880.000	1 Kantor	Rp1.127.328.000	1 Kantor	Rp1.352.793.600	1 Kantor	Rp1.352.793.600	Kantor Perwakilan Jakarta
					Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan penyelenggaraan administrasi perkantoran	Persentase	100%	100%	Rp7.272.342.468	100%	Rp8.314.019.120	100%	Rp9.673.226.972	100%	Rp9.673.226.972	

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						n yang terlayani											
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	Tahun	-	1 Tahun	Rp533.820.000	1 Tahun	Rp587.202.000	1 Tahun	Rp645.922.200	1 Tahun	Rp645.922.200	Setda Banjar
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah gedung yang terlayani kebutuhan listrik, air dan telpon	Gedung	-	3 Gedung	Rp1.300.000.000	6 Gedung	Rp1.560.000.000	6 Gedung	Rp1.872.000.000	6 Gedung	Rp1.872.000.000	Kab. Banjar
					Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jaminan dan pemeliharaan kesehatan bagi KDH/WKDH	Orang	-	6 Orang	Rp213.996.268	6 Orang	Rp120.000.000	6 Orang	Rp144.000.000	6 Orang	Rp144.000.000	Kab. Banjar

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pelayanan perizinan operasional kendaraan bermotor	Unit	-	115 Unit	Rp125.000.000	116 Unit	Rp150.000.000	116 Unit	Rp180.000.000	116 Unit	Rp180.000.000	Kab. Banjar
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Aturan Yang Berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel	Dokumen/Laporan	-	19 Dokumen/Laporan	Rp612.093.200	29 Dokumen/Laporan	Rp673.302.520	32 Dokumen/Laporan	Rp740.632.772	32 Dokumen/Laporan	Rp740.632.772	Setda Banjar
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pelayanan kebersihan kantor	Gedung	-	3 Gedung	Rp575.200.000	6 Gedung	Rp690.240.000	6 Gedung	Rp828.288.000	6 Gedung	Rp828.288.000	Kab. Banjar
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah layanan ATK yang terpenuhi	Tahun	-	1 Tahun	Rp234.550.000	1 Tahun	Rp258.005.000	1 Tahun	Rp283.805.500	1 Tahun	Rp283.805.500	Setda Banjar

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Pnggunaan	Jumlah layanan barang cetakan dan penggantian yang terpenuhi	Tahun	-	1 Tahun	Rp181.500.000	1 Tahun	Rp199.650.000	1 Tahun	Rp219.615.000	1 Tahun	Rp219.615.000	Setda Banjar
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah gedung yang terlayani penyediaan jasa komponen listrik atau penerangan	Gedung	-	3 Gedung	Rp75.000.000	6 Gedung	Rp90.000.000	6 Gedung	Rp108.000.000	6 Gedung	Rp108.000.000	Kab. Banjar
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pelayanan kedinasan/tamu	Tahun	-	1 Tahun	Rp2.223.183.000	1 Tahun	Rp2.667.819.600	1 Tahun	Rp3.201.383.500	1 Tahun	Rp3.201.383.500	Kab. Banjar
					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Jumlah administrasi perjalanan dinas pejabat dalam melakukan rapat-	Tahun	-	1 Tahun	Rp1.198.000.000	1 Tahun	Rp1.317.800.000	1 Tahun	Rp1.449.580.000	1 Tahun	Rp1.449.580.000	Luar daerah

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						rapat yang dilayani											
					Program peningkatan sarana dan prasarana	Persentase tertib pengelolaan barang/aset daerah di lingkungan sekretariat daerah	Persentase	-	80%	Rp2.511.720.000	85%	Rp2.730.192.000	90%	Rp3.276.230.400	90%	Rp3.276.230.400	Kab. Banjar
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah aset perlengkapan gedung yang tercatat	Tahun	-	1 Tahun	Rp91.700.000	1 Tahun	Rp72.840.000	1 Tahun	Rp87.408.000	1 Tahun	Rp87.408.000	Kab. Banjar
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah aset peralatan gedung kantor yang tercatat	Tahun	-	1 Tahun	Rp7.160.000	1 Tahun	Rp8.592.000	1 Tahun	Rp10.310.400	1 Tahun	Rp10.310.400	Kab. Banjar

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Pengadaan Mebeleur	Jumlah aset mebeleur yang tercatat	Tahun	-	1 Tahun	Rp79.160.000	1 Tahun	Rp37.200.000	1 Tahun	Rp44.640.000	1 Tahun	Rp44.640.000	Kab. Banjar
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Rumah Jabatan	Jumlah pelayanan pemeliharaan rumah KDH dan WKDH	Rumah	-	2 Rumah	Rp747.400.000	2 Rumah	Rp828.000.000	2 Rumah	Rp993.600.000	2 Rumah	Rp993.600.000	Kab. Banjar
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pelayanan pemeliharaan gedung kantor	Gedung	-	5 Gedung	Rp208.300.000	5 Gedung	Rp159.960.000	5 Gedung	Rp191.952.000	5 Gedung	Rp191.952.000	Kab. Banjar
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah pelayanan pemeliharaan mobil KDH/WKDH	Unit	-	4 Unit	Rp270.000.000	4 Unit	Rp324.000.000	4 Unit	Rp388.800.000	4 Unit	Rp388.800.000	Kab. Banjar
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pelayanan operasional kendaraan bermotor	Unit	-	115 Unit	Rp933.000.000	116 Unit	Rp1.089.600.000	116 Unit	Rp1.307.520.000	116 Unit	Rp1.307.520.000	Kab. Banjar

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pelayanan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Tahun	-	1 Tahun	Rp15.000.000	1 Tahun	Rp18.000.000	1 Tahun	Rp21.600.000	1 Tahun	Rp21.600.000	Kab. Banjar
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pelayanan pemeliharaan peralatan gedung kantor	Tahun	-	1 Tahun	Rp160.000.000	1 Tahun	Rp192.000.000	1 Tahun	Rp230.400.000	1 Tahun	Rp230.400.000	Kab. Banjar
					Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pelayanan Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase	100%	100%	Rp90.720.000	100%	Rp108.864.000	100%	Rp130.636.800	100%	Rp130.636.800	Kab. Banjar
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas KDH/WKDH beserta perlengkapannya	Stell	-	26 Stell	Rp. 64.320.000	26 Stell	Rp77.184.000	26 Stell	Rp92.620.800	26 Stell	Rp92.620.800	Kab. Banjar

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
									Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi kinerja pada akhir periode		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu KDH/WKDH	Stell	-	14 Stell	Rp26.400.000	14 Stell	Rp31.680.000	14 Stell	Rp38.016.000	14 Stell	Rp38.016.000	Kab. Banjar
					Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase PNS yang mendapat peningkatan kapasitas aparatur	Persentase	-	40%	Rp48.000.000	60%	Rp52.800.000	67%	Rp58.080.000	67%	Rp58.080.000	Luar daerah
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan non gelar	Orang	-	6 Orang	Rp48.000.000	9 Orang	Rp52.800.000	10 Orang	Rp58.080.000	10 Orang	Rp58.080.000	Luar daerah

### A.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA

Indikator kinerja sasaran tahun 2021 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja tahun 2021 Perubahan Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2021, untuk mengetahui kemampuan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

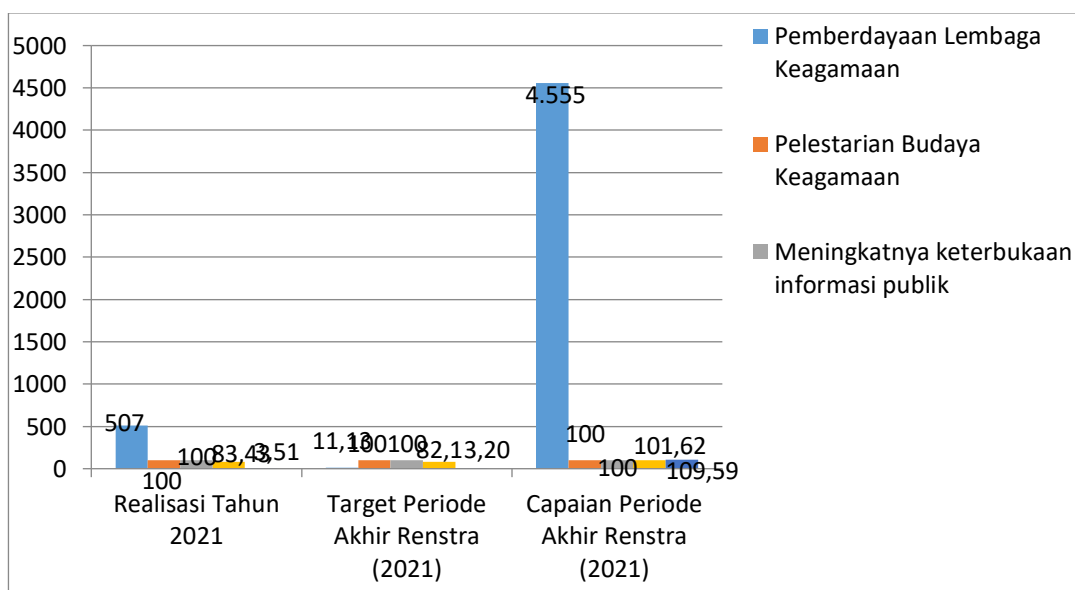
**Tabel 10 Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Target Periode Akhir**

Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Periode Akhir Renstra (2021)	Capaian Periode Akhir Renstra (2021)
1	2	3	4	5	6	7
Pemberdayaan Lembaga Keagamaan	Persentase Peningkatan dana zakat yang tersalurkan	((Realisasi Tahun Berjalan - Realisasi Awal Tahun Renstra) / (Realisasi Awal Tahun Renstra)) x 100	Persentase	507	11,13	4.555
Meningkatnya pengelolaan lembaga zakat	Jumlah ZIS yang terkumpul	((Target penerimaan ZIS di tahun berjalan dikurang penerimaan ZIS tahun sebelumnya) dibagi realisasi ZIS tahun sebelumnya dikali 100)	Rupiah	1.975.238.029	699.840.000	282
Pelestarian Budaya Keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	Jumlah kegiatan keagamaan yang di fasilitasi dibagi dengan jumlah kegiatan keagamaan yang menjadi tanggung jawab pemkab banjar	Persentase	100	100	100

Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Periode Akhir Renstra (2021)	Capaian Periode Akhir Renstra (2021)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kegiatan keagamaan yang diperingati	Persentase kegiatan keagamaan yang diperingati	Jumlah hari-hari besar kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dibagi dengan Jumlah hari-hari besar kegiatan keagamaan di kali 100	Persentase	100	100	100
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase SKPD Yang menginput RUP ke aplikasi SIRUP	Jumlah SKPD yang menginput RUP ke SIRUP dibagi Jumlah Total SKPD x 100 %	Persentase	100	100	100
Meningkatnya paket pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu	Paket lelang PBJ yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu dibagi dengan jumlah paket lelang yang ada di SIRUP kali 100	Persentase	100	92	109
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai SKM unit penyelenggara pelayanan publik dikali 25	Nilai/indeks	83,43	82,1	101,62
Meningkatnya Prosentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumentasi road map reformasi birokrasi	Prosentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumentasi road map reformasi birokrasi	Jumlah Kegiatan yang ada didalam Dokumen Roadmap Birokrasi yang telah dilaksanakan dibagi Jumlah kegiatan yang direncanakan didalam Dokumen Roadmap Birokrasi kali 100	Persentase	100	100	100
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai/Skor EKPPD	Penilaian yang diberikan oleh Kemendagri	Persentase	3.5069	3.2000	109,59

Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Periode Akhir Renstra (2021)	Capaian Periode Akhir Renstra (2021)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Persentase keterisian data Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan rata-rata ikm kecamatan	Persentase keterisian data Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Jumlah IKK yang terisi dibagi jumlah IKK dikali 100	Persentase	100	100	100
	Rata-rata IKM Kecamatan	Jumlah rata-rata SKM seluruh kecamatan dibagi Standar IKM Kabupaten tahun berjalan kali 100	Persentase	85,46	84	101,74

**Grafik 3 Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Target Periode Akhir**



Dari Grafik diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi kinerja tahun 2021 pada Sasaran PEMBERDAYAAN Lembaga Keagamaan adalah 507% jika dibandingkan dengan target periode akhir renstra 11,13 maka tingkat capaian kinerjanya adalah 4.555% capaian ini sudah melampaui jauh dari target periode akhir renstra yaitu 11,13;
2. Realisasi kinerja tahun 2021 pada Sasaran PELESTARIAN Budaya Keagamaan adalah 100% jika dibandingkan dengan target periode akhir renstra 100% maka tingkat capaian kinerjanya adalah 100%;

3. Realisasi kinerja Sasaran Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik adalah 100% jika dibandingkan dengan target periode akhir renstra 100% maka tingkat capaian kerjanya adalah 100%;
4. Realisasi kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik adalah 83,43% jika dibandingkan dengan target periode akhir renstra 82,10 maka tingkat capaian kerjanya adalah 101,62%;
5. Realisasi kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah adalah 3,5069 jika dibandingkan dengan target periode akhir renstra 3,2000 maka tingkat capaian kerjanya adalah 109,59%

#### A.4 REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2021 DAN TARGET NASIONAL

Merupakan capaian kinerja yang membandingkan dengan kinerja yang ditargetkan nasional, untuk mengukur keberhasilan daerah dengan standar Nasional.

**Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021, Realisasi Provinsi dan Nasional**

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM	SATUAN	REALISASI PROVINSI TAHUN 2021	TARGET NASIONAL TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6
Pemberdayaan Lembaga Keagamaan	Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan	Persentase	-	-	507
Program Peningkatan pengelolaan lembaga zakat	Jumlah ZIS yang terkumpul	Rupiah	-	-	1.975.238.029
Program penunjang penyelenggaraan hari-hari besar	Persentase kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	Persentase	-	-	100
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase SKPD Yang menginput RUP ke aplikasi SIRUP	Persentase	-	-	100
Program pengadaan barang dan jasa	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu	Persentase	-	-	100
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai/Indeks	-	-	83,43
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan	Persentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumentasi	Persentase	-	-	100

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM	SATUAN	REALISASI PROVINSI TAHUN 2021	TARGET NASIONAL TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6
pembinaan kelembagaan	road map reformasi birokrasi				
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai/Skor EKPPD	Persentase	-	-	3.5069
Program penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase keterisian data Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Persentase	-	-	100
	Rata-rata IKM Kecamatan	Persentase	-	-	85,46

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

### B.1 SASARAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEAGAMAAN

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran pemberdayaan lembaga keagamaan melalui 1 (Satu) indikator kinerja, Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 12 Realiasi Indikator Tahun 2021**

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan	11,13	507	4.555%

Sumber : Bagian Kesra

Sasaran Pemberdayaan Lembaga Keagamaan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Peningkatan dana zakat yang tersalurkan.

Indikator Kinerja Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan memiliki definisi operasional berupa zakat yang disalurkan dari Baznas ke Fakir Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Fisabilillah, Ibnu Sabil. sedangkan formulasinya berupa realisasi tahun berjalan dikurang realisasi tahun awal renstra dibagi realisasi tahun awal renstra di kali 100.

Dalam rangka merealisasikan peran kontribusi zakat, infaq dan sedekah bagi masyarakat Kabupaten Banjar, maka Pemerintah Kabupaten Banjar membentuk lembaga BAZNAS Kabupaten Banjar. BAZNAS Kabupaten Banjar merupakan Lembaga Pemerintah

non Struktural yang bersifat mandiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan Zakat dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, serta mengupayakan pendistribusian dana zakat, infaq, shadaqah dalam dalam rangka memberdayakan keluarga kurang mampu berdasarkan prinsip :

- Skala prioritas
- Pemerataan
- Keadilan dan
- Kemitraan

Selain itu juga Baznas Kabupaten Banjar mempunyai regulasi daerah yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 8 Tahun 2017 Pengelolaan Zakat, salah satu bentuk penguatan regulasi di daerah tentang pengelolaan zakat, sehingga Keberadaan BAZNAS Kabupaten Banjar turut mendukung Program Pemerintah Kabupaten Banjar menuju Kabupaten yang Sejahtera dan Barokah.

Prinsip dasar pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Banjar :

- Kepercayaan.
- Amanah.
- Transparan

Program Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Banjar:

1. Banjar Taqwa :

- Pembinaan Muallaf Rutinan di Islamic Center Darul Muallifin
- Sunatan Massal untuk anak Muallaf di Kec. Paramasan
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah
- Santunan Tunai untuk Guru Agama dan Pengasuh Anak Panti Asuhan
- Bantuan Menunjang Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan

2. Banjar Peduli :

- Bedah Rumah Warga Dhuafa
- Bantuan Pasca Bencana
- Paket Sembako Bedah Rumah membawa Berkah
- Bantuan Gharim dan Ibnu Sabil
- Santunan Tunai Ramadhan 1443H untuk warga Dhuafa
- Paket Sembako Ramadhan 1443H untuk Warga Dhuafa

3. Banjar Makmur :
- Tabungan Mustahik BAZNAS/Bantuan Modal Usaha Produktif
  - Becak Berkah BAZNAS
4. Banjar Cerdas :
- Satu Keluarga Dhuafa Satu Sarjana
  - Beasiswa Pendidikan untuk Pelajar, Santri dan Siswa Madrasah dari Keluarga Dhuafa
  - Kerjasama Program Pendidikan dengan UPZ Sekolah
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan
5. Banjar Sehat :
- Layanan Biaya Kesehatan Warga Dhuafa di Rumah Sakit
  - Bantuan Pelunasan Tunggakan Biaya Kesehatan Warga Dhuafa yang sakit

Pada tahun 2021 dari target Penyaluran BAZNAS Kabupaten Banjar sebesar Rp. 11,13 maka sampai Desember 2021 realisasi penyaluran sebesar 507 persentase realisasi yang sangat tinggi yaitu 4.555%

Hal ini terlihat peranan BAZNAS yang cukup besar dalam menyalurkan bantuan untuk masyarakat di Kabupaten Banjar.

Pengumpulan dan Pendistribusian ZIS Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar sampai bulan Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 13 Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat**

<b>I.</b>	Saldo Tahun 2020	<b>Rp. 461.110.450,55</b>
<b>II</b>	<b>Pengumpulan</b>	
1.	Zakat	<b>Rp. 175.490.200,00</b>
2.	Infaq, ShadaqAH	<b>Rp. 1.797.540.170,00</b>
3.	Nisbah / Bagi Hasil	<b>Rp. 2.207.659,00</b>
	<b>Jumlah Pengumpulan (II)</b>	<b>Rp. 1.975.238.029,00</b>
<b>III</b>	<b>Pendistribusian</b>	-
1.	Fakir	Rp. 117.760.300,00
2.	Miskin	Rp. 1.608.227.350,00
3.	Muallaf	Rp. 28.285.000,00
4.	Fisabilillah	Rp. 333.180.000,00
5.	Ibnu Sabil	Rp. 1.350.000,00
6.	Gharim	Rp. 8.000.000,00
7.	Riqab	Rp. -
8.	Amil	Rp. 176.919.200,00

	<b>Jumlah Pendistribusian III</b>	<b>Rp. 2.273.721.850,00</b>
	<b>Saldo Akhir (I+II-III)</b>	<b>Rp. 162.626.629,57</b>

Sumber : Laporan akhir tahun BAZNAS Kab. Banjar

Seluruh pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang dihimpun BAZNAS Kabupaten Banjar dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp. **1.975.238.029,00,-** (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah ) dan Saldo Tahun 2020 sebesar Rp. **461.110.450,55** (Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Koma Lima Lima Rupiah).

Sedangkan Pengeluaran ZIS dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. **2.273.721.850,00** (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri dari penyaluran ZIS kepada yang berhak dan pengeluaran Operasional dari hak amil.

Realisasi ini sangat baik yaitu 325% hal ini terlihat peran BAZNAS yang cukup besar dalam menyalurkan bantuan untuk masyarakat di Kabupaten Banjar. Adapun capaian kinerja sasaran di atas didukung oleh Program Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

Pada awal tahun 2017 dalam program awal zakat infaq dan sedekah, pemerintah daerah menyalurkan dana zakat sebesar Rp. 374.281.000 , namun pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun. Realisasi zakat yang tersalurkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 325% dari tahun 2017.

Peningkatan tersebut adalah bentuk tingginya tingkat kesadaran berpartisipasi dan kepedulian masyarakat untuk mengeluarkan zakat infaq dan sedekah, serta adanya dukungan penuh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dari aspek regulasi dan pendanaan dari APBD Kabupaten Banjar untuk mendukung aktivitas Baznas di Kabupaten Banjar.

#### **Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran:**

- 1) Pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus seiring dengan program-program pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang dicanangkan Pemerintah Daerah;
- 2) BAZNAS dan pemerintah kabupaten Banjar dapat bekerjasama agar penghimpunan, penyaluran, pelaporan, dan pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS terkait dana zakat dapat mencapai target yang tepat.

- 3) Pemerintah Daerah beserta Stakeholder terkait dapat memperkuat regulasi yang sudah ada, untuk tata pengelolaan dana zakat;
- 4) Perlunya BAZNAS memformulasikan strategi untuk mengoptimisasi dana pengumpulan zakat diberbagai sektor;
- 5) BAZNAS lebih pro aktif untuk lebih mensosialisasikan ke sektor swasta dan masyarakat umum di Kabupaten Banjar;
- 6) Adanya rasionalisasi pagu anggaran dalam rangka upaya penanganan Pemerintah Daerah melalui realokasi dan refocusing untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19, sehingga diminta untuk mengurangi pagu anggaran di setiap kegiatan salah satunya pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan mengurangi pagu dan target yang telah dicanangkan.

**Upaya perbaikan :**

1. Membuat langkah inovasi dan terubosan dalam rangka mengiptimalkan pengumpulan dan penyaluran zakat yang lebih lebih efektif.
2. Memfasilitasi rapat koordinasi.

**Tindak lanjut yang akan datang :**

1. Mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat untuk berzakat, Infaq dan Shadaqah melalui Lembaga Resmi yaitu BAZNAS dan LAZ.
2. Rapat koordinasi dengan stakeholder terkait.

Adapun tingkat capaian program dan kegiatan secara rinci sebagai berikut :

**Tabel 14 Capaian Program/Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021  
Sasaran Pemberdayaan Lembaga Keagamaan**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun N terhadap target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/ Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 kegiatan	100	8 kegiatan	4 Laporan	50	13 Kegiatan	40
	Sub Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan Sosial	7 Laporan	100	7 Laporan	4 Laporan	57	7 Laporan	57
		2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	100
		34 UPZ		34 UPZ	34 UPZ	100	34 UPZ	100
	Sub Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat	45 Orang	100	60 Orang	50 Orang	83	60 Orang	83

Sumber: Bagian Kesra

**KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Pagu anggaran Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 5.610.184.268,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.319.324.252,- (91.61%) dan realisasi fisik 94.82 %. Kegiatan ini didukung dengan Sub kegiatan- Sub kegiatan sebagai berikut :

A. Sub Kegiatan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan sosial

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun N terhadap target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/ Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan Sosial	7 Laporan 2 Laporan 34 UPZ	100	7 Laporan 2 Laporan 34 UPZ	4 Laporan 2 Laporan 34 UPZ	57 100 100	7 Laporan 2 Laporan 34 UPZ	57 100 100

Sumber : Bagian Kesra

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 555.520.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 403.329.232 (72,60%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.

Target kinerja pada sub kegiatan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan sosial realisasi kinerja 1 (satu) tahun dengan capaian 100 %.

Adapun realisasi sub kegiatan berupa 4 laporan koordinasi dengan lembaga/organisasi masyarakat, yaitu 4 rapat koordinasi penyelenggaraan kegiatan sosial, 2 laporan money hibah, dan 34 UPZ lembaga zakat .

**Faktor Keberhasilan :**

- a) Terasilitasinya koordinasi antar instansi dan stakeholder pada kegiatan kesejahteraan sosial sehingga permasalahan dapat teratasi.

**Faktor Kegagalan :**

- a) Tidak lengkapnya kehadiran instansi stakeholder dalam sebagian rapat koordinasi sehingga permasalahan belum dapat terselesaikan sesuai jadwal pada kegiatan kesejahteraan sosial.

B. Sub Kegiatan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan masyarakat

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun N terhadap target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/ Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat	45 Orang	100	60 Orang	50 Orang	83	60 Orang	83

Sumber : Bagian Kesra

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 1.406.506.868 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.400.734.206 (99,59%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.

Target kinerja pada sub kegiatan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan masyarakat realisasi kinerja 1 (satu) tahun dengan capaian 100 %

Adapun realisasi sub kegiatan sebanyak 50 orang tokoh masyarakat yang mendapat bantuan kesehatan.

**Faktor Keberhasilan :**

- a) Terfasilitasinya koordinasi antar instansi dan stakeholder pada kegiatan kesejahteraan masyarakat sehingga permasalahan dapat teratasi.

**Faktor Kegagalan :**

- b) Tidak lengkapnya kehadiran instansi stakeholder dalam sebagian rapat koordinasi sehingga permasalahan belum dapat terselesaikan sesuai jadwal pada kegiatan kesejahteraan masyarakat.

## B.2 SASARAN PELESTARIAN BUDAYA KEAGAMAAN

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran Pelestarian Budaya Keagamaan melalui 1 (Satu) indikator kinerja. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 15 Realisasi Indikator Tahun 2021**

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Persentase kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	100	100	100%

Sumber : Bagian Kesra

Sasaran Pelestarian Budaya Keagamaan dengan indikator kinerja sasaran Persentase kegiatan keagamaan yang terfasilitasi.

Indikator Kinerja Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan memiliki definisi operasional berupa Kegiatan keagamaan yang difasilitasi. sedangkan formulasinya berupa jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi dibagi jumlah kegiatan keagamaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banjar dikali seratus.

Sasaran Pelestarian Budaya keagamaan ini bertujuan untuk memfasilitasi dilaksanakan oleh Sekretariat daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti maulid Habsyi yang dilaksanakan setiap bulan bertempat di Mahligai Sultan Adam dan peringatan hari – hari besar Islam seperti seperti Peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW, namun sejak munculnya wabah pandemi Covid-19 kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar Islam tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan, sehingga untuk target tahun 2021 dikurangin menjadi 4 kegiatan yang awalnya 8 kegitan.

Dalam tahun 2021 maulid habsy dilaksanakan hanya 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 30 Desember 2021 dalam rangka istigoshah doa bersama agar terhindar dari wabah covid-19 dihadiri oleh Bupati dan wakil Bupati Banjar, Sekretaris, para Asisten, kepala SKPD dan ASN bertempat di Aula Barakat Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, lalu pelaksanaan pengajian agama , peringatan maulid nabi Muhammad SAW dan Buka Puasa, sehingga menjadi 4 kegiatan.

**Faktor keberhasilan/kegagalan sasaran ini adalah :**

- Terjalin kerjasama dan koordinasi antara pelaksana dengan lembaga keagamaan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan dengan baik.

- Karena adanya covid-19 sehingga tidak diperbolehkannya mengadakan acara pertemuan dalam jumlah peserta yang banyak, maka hal ini berakibat pada pelaksanaan penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan yang sempat terhenti. Untuk tetap melaksanakan hari-hari besar keagamaan maka jumlah peserta dibatasi dengan tetap menjaga jarak.

**Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran:**

- Perencanaan harus lebih baik dan berkoordinasi dengan Bagian Protokol dan Humas dan lembaga keagamaan lainnya.

**Upaya perbaikan :**

- Meningkatkan kesadaran ASN Kabupaten Banjar mengikuti kegiatan keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW.

**Tindak lanjut yang akan datang :**

1. Meningkatkan koordinasi antar SKPD;
2. Meningkatkan intensitas rapat dalam rangka persiapan melaksanakan hari-hari besar keagamaan.

Adapun tingkat capaian program dan kegiatan secara rinci sebagai berikut :

**Tabel 16 Capaian Program/Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021  
Sasaran Pelestarian Budaya Keagamaan**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun N terhadap target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/ Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 kegiatan	100	8 kegiatan	4 Laporan	50	13 Kegiatan	40

Sumber : Bagian Kesra

#### A. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 3.648.157.400 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 3.335.489.248 (91,43%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.

Target kinerja pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual realisasi kinerja 1 (satu) tahun dengan capaian 100 %

Adapun realisasi sub kegiatan sebanyak 3 kegiatan yakni mauleh habsyi, pengajian agama, dan peringatan maulid nabi Muhammad SAW .

#### Faktor Keberhasilan :

- Terselenggaranya kegiatan keagamaan dan hari-hari besar islam sesuai rencana.

#### Faktor Kegagalan :

- Tidak semua kegiatan keagamaan dan hari-hari besar islam dapat terlaksana karena adanya pandemi.

### B.3 SASARAN MENINGKATNYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

**Tabel 17 Realisasi Indikator Tahun 2021**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Persentase SKPD yang Menginput RUP ke Aplikasi SiRUP	100%	100%	100%

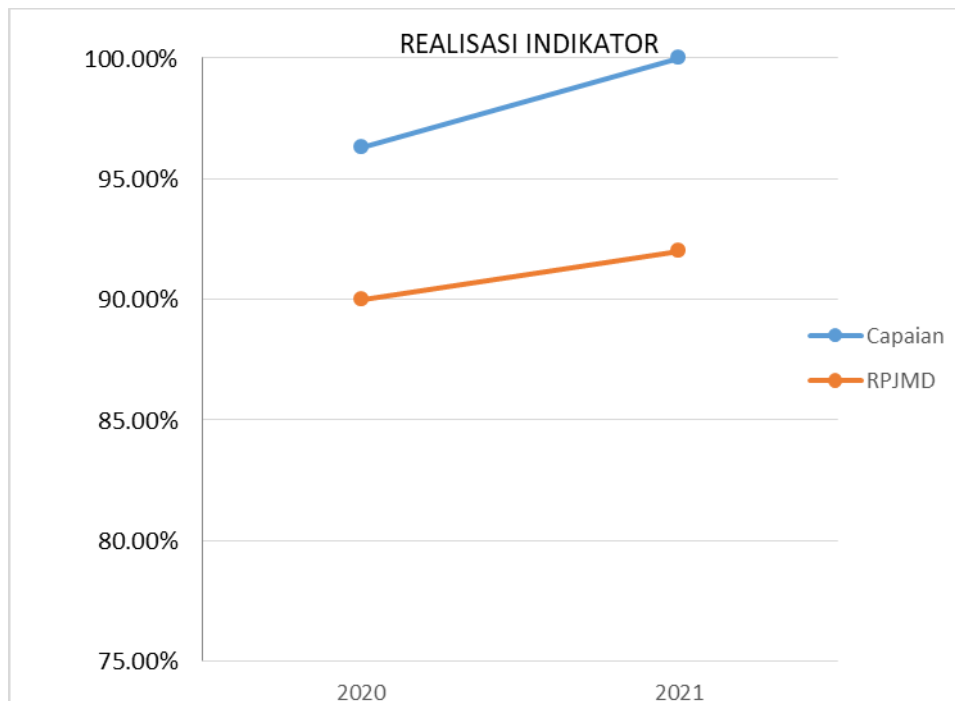
Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa setiap SKPD berkewajiban untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), maka pelaksanaan pendampingan input Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan berjadwal kepada seluruh SKPD, seperti yang diuraikan sebagai berikut:

- 6 Januari 2021 dilakukan penyampaian surat kepada SKPD untuk melakukan input RUP TA 2021 pada Aplikasi SiRUP. Terdapat 37 peserta yang melakukan input dengan langsung berhadir ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Banjar. Rata-rata peserta hadir dengan 2 personil (1 operator dan 1 pendamping).
- Tanggal 8 April 2021 dilakukan penyampaian surat kepada SKPD untuk melakukan input SIRUP melalui aplikasi Zoom Meeting, terdapat 7 SKPD yang melakukan input.
- Tanggal 12 Oktober 2021 dilakukan penyampaian surat kepada SKPD untuk melakukan input SIRUP terkait dengan perubahan APBD.
- Pelaksanaan pendampingan input SIRUP juga dilakukan diluar jadwal tersebut diatas melalui komunikasi lisan, dengan tujuan untuk meminimalisir kekeliruan dalam menginput data SIRUP.

- Dari total 54 SKPD seluruhnya telah melaksanakan penginputan RUP sehingga realisasi kinerja 100% dengan capain 100%

Realisasi Indikator Kinerja terhadap RPJMD diperlihatkan pada grafis berikut :



Pada tahun 2021 memiliki capaian indikator kinerja sasaran sebesar 100% yang diartikan bahwa dari 54 SKPD, terdapat 54 SKPD yang melaksanakan input SIRUP.

▪ **Faktor keberhasilan/kegagalan sasaran ini adalah:**

Pemahaman Pemangku Kepentingan (stakeholder) pada SKPD terhadap proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah memiliki peranan yang besar. Proses yang harus dipahami bahwa pengadaan barang dan jasa tidak hanya pada saat pelaksanaan proses pemilihan (e-tender, e-seleksi, pengadaan langsung) saja, tetapi dimulai dari proses perencanaan (planning), perancangan (design) dan pelaksanaan (construction).

Seperti yang disebutkan dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 30 Tahun 2020 tanggal 04 November 2020 tentang Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Sebelum Tahun Anggaran 2021 Berjalan, pada angka 5 huruf a ayat 1): pengumuman RUP telah dilaksanakan untuk seluruh belanja pengadaan barang/jasa tanpa terkecuali.

Surat edaran ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan Presiden memerintahkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara/Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyelesaikan RUP Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya

sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan secara transparan, cermat dan akuntabel.

Kepatuhan dalam melakukan pengumuman RUP tepat waktu berarti tercapainya pemenuhan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (value for money).

- Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran (sesuatu yang menjadi perhatian ditahun yang akan datang) :
  - 1) Pemangku Kepentingan SKPD saat input SIRUP menginstruksikan kepada operator agar memperhatikan opsi-opsi yang terdapat didalam SIRUP, yaitu metode pemilihan, pemanfaatan barang/jasa, jadwal pelaksanaan kontrak, jadwal pemilihan penyedia. Pengisian data yang cermat pada opsi-opsi tersebut dapat membantu dalam ketepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
  - 2) Kecamatan-kecamatan yang terletak dipelosok masih memiliki keterbatasan akses jaringan internet, sehingga untuk melakukan input SIRUP harus mencari lokasi dengan akses jaringan internet yang bagus.
  - 3) Pergantian operator SIRUP beberapa kali ditemui sehingga terdapat pengulangan transfer pengetahuan input SIRUP, hal ini dapat menghambat kemajuan SKPD dalam ketepatan waktu input RUP.
  - 4) Akses ke Server pada situs web SIRUP LKPP masih sering ditemui gangguan walaupun intensitasnya mengalami pengurangan, karena jumlah pengguna yang melakukan akses juga mengalami peningkatan, diharapkan LKPP mampu menambah kapasitas akses pada situs web tersebut sehingga terhindar dari server mati ketika memasuki jam sibuk (peak hour)
  
- **Upaya perbaikan :**
  - 1) Peningkatan Infrastruktur di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
  - 2) Melakukan koordinasi dan pendampingan yang intens terhadap SKPD-SKPD yang banyak memiliki paket-paket pengadaan barang/jasa.
  
- **Tindak Lanjut yang akan datang :**
  - 1) Pemberian sanksi terhadap SKPD yang terlambat melaksanakan penginputan RUP pada aplikasi SiRUP sampai dengan akhir Januari tahun berjalan.
  - 2) Penambahan unit komputer untuk kemudahan akses dan layanan ketika terdapat rekan-rekan dari SKPD lain yang memerlukan bantuan serta diskusi pengadaan barang dan jasa.
  - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Banjar secara konsisten melakukan pendampingan dalam penginputan SIRUP, membuka ruang seluas-luasnya dalam hal diskusi dan konsultasi pengadaan barang dan jasa yang dibantu oleh rekan-rekan fungsional pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Banjar.

Adapun tingkat capaian Program dan Kegiatan Secara Rinci Sebagai Berikut :

**Tabel 18 Capaian Program/ Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021  
Sasaran Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun N terhadap target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Perekonomian dan Pembangunan/ Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	4 Laporan 4 Laporan	100	4 Laporan 4 Laporan	4 Laporan 4 Laporan	100	4 Laporan 4 Laporan	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	52 SKPD	96,30	54 SKPD	54 SKPD	100	54 SKPD	100
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	54 orang	54 orang	100	54 orang	100

Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

### KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2021 dari pagu sebesar Rp 563.418.100 ,- adalah sebesar Rp 440.619.151 ,- (78,20%) dengan realisasi fisik 100%.

Adapun penggunaan anggaran diuraikan pada program dan kegiatan sebagai berikut :

#### A. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun N terhadap target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Perekonomian dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Pembangunan/ Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa							
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	4 Laporan 4 Laporan	100	4 Laporan 4 Laporan	4 Laporan 4 Laporan	100	4 Laporan  4 Laporan	100

Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 10.308.300- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 7.804.200 (75.71%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada Sub kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa adalah 8 Laporan dengan realisasi kinerja 8 Laporan dengan capaian 100%.

Adapun realisasi kegiatan berupa 4 Laporan Paket Lelang yang dilaksanakan sesuai dengan aplikasi Sirup dan 4 Laporan Kontrak.

**Faktor Keberhasilan Sub Kegiatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa :**

- Tertib Administrasi pelaporan pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang disusun sesuai ketentuan.
- Terkelolanya pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE).

**Faktor Kegagalan Sub Kegiatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa :**

- Tidak Tertibnya Administrasi pelaporan pengelolaan PBJ.
- Kurangnya kepatuhan SKPD dalam pelaksanaan e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender/seleksi melalui SPSE.

**B. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Secara Elektronik**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun N terhadap target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Perekonomian dan Pembangunan/ Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan	52 SKPD	96,30	54 SKPD	54 SKPD	100	54 SKPD	100

	Pengadaan Secara Elektronik							
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 495.348.200- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 385.001.251 (77,72%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa adalah 54 SKPD dengan realisasi kinerja 54 SKPD dengan capaian 100%.

Adapun realisasi kegiatan berupa 54 SKPD telah melaksanakan penginputan RUP pada aplikasi SIRUP.

**Faktor Keberhasilan Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Secara Elektronik:**

- Terkelolanya sistem informasi pengadaan barang dan jasa serta infrastruktur pendukung.
- Terkelolanya rencana umum pengadaan melalui aplikasi SiRUP.

**Faktor Kegagalan Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Secara Elektronik :**

- Belum terkelolanya seluruh sistem informasi PBJ dan Infrastruktur pendukung sesuai ketentuan.
- Rendahnya persentase SKPD yang menginput RUP ke aplikasi SiRUP dengan tepat waktu.

**C. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun N terhadap target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Perekonomian dan Pembangunan/ Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	54 orang	54 orang	100	54 orang	100

Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 57.761.600- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 47.813.700- (82.78%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa adalah 54 Orang dengan realisasi kinerja 54 Orang dengan capaian 100%.

Adapun realisasi kegiatan berupa melaksanakan dan mengikuti kegiatan Bimtek dan Pelatihan internal maupun external dengan jumlah 54 Orang di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

**Faktor Keberhasilan Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa :**

- a) Terpenuhinya peningkatan kapasitas pelaku pengadaan barang/jasa.

**Faktor Kegagalan Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa :**

- a) Kurangnya minat pelaksana PBJ dalam meningkatkan kompetensi.  
b) Kurangnya SDM PBJ untuk menjadi fungsional pengadaan barang dan jasa.

**B.4 SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian **berhasil**. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 19 Realisasi Indikator Tahun 2021**

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,1	83,43	100,62%

Sumber : Bagian Organisasi

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki definisi operasional berupa Nilai Kumulatif hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dari Unit Pelayanan Publik dengan formulasi perhitungan Nilai SKM unit penyelenggara Publik dikali dua puluh lima.

Tercapai nilai IKM dari target yang ditetapkan pada tahun 2021 sesuai target yang ditetapkan melebihi 100% adalah semakin meningkatnya kesadaran dan komitmen dari pimpinan dan pelaksana layanan untuk memberika pelayanan publik yang terbaik dan prima kepada masyarakat/penerima layanan.

Tahun 2021 sebagaimana terbitnya Peraturan Bupati Banjar nomor 66 Tahun 2020 tentang pedoman Survei Kepuasan Masyarakat di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang mengamanatkan kepada semua perangkat daerah di Kabupaten Banjar untuk melaksanakan SKM kepada penerima layanan sebagai upaya peningkatan kinerja layanan pada perangkat daerah masing-masing. Dan bagi perangkat daerah yang baru melaksanakan SKM, maka data ini dijadikan baseline pelaksanaan SKM ditahun-tahun berikutnya. Dengan penambahan pelaksana/unit pelayanan yang melaksanakan SKM maka diharapkan data IKM di kabupaten Banjar dapat terukur secara menyeluruh. Untuk tahun 2021, dengan semua perangkat daerah maka didapat hasil yang telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik pada semua perangkat daerah rata-rata dinyatakan baik.

Terjadinya Pandemi Covid-19 ditahun 2021, publik karena hampir seluruh pelayanan publik secara tatap muka diawal pandemi ditiadakan, diganti dengan pelayanan publik secara online. pelayanan dilakukan secara online agar kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik tetap dapat diberikan secara maksimal. Akan tetapi pelayanan online tidak sepenuhnya dapat berjalan lancar karena kondisi penerima layanan publik masyarakat sebagian besar masih belum melek teknologi informasi sehingga terdapat kendala dalam pemberian pelayanan. Sehingga kemudian dilakukan kombinasi pelayanan publik, secara online dan tatap muka. Hal ini membawa inovasi pelayanan dan mempermudah layanan kedepannya

Adapun tingkat capaian program dan kegiatan secara rinci sebagai berikut :

**Tabel 20 Capaian Program / Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021  
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

No	Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun n Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Program Penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota kegiatan Penataan Organisasi</b>	-	-	100 %	100 %	100	100 %	100
	Sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	100

	Sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	100
	Sub kegiatan peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	-	1 Dokumen, 4 laporan	1 Dokumen, 4 Laporan	100	1 Dokumen, 4 Laporan	100

Sumber : Bagian Organisasi

### KEGIATAN PENATAAN ORGANISASI

Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2021 dari pagu sebesar 789.291,000,- adalah sebesar Rp 719,744,052,- (91,19%), dengan realisasi fisik 100%.

Program/kegiatan ini di dukung sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut ;

#### A. Sub kegiatan Peningkatan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

No	Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun n Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Program Penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota kegiatan Penataan Organisasi</b>	-	-	100 %	100 %	100	100 %	100
	Sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	100

Sumber : Bagian Organisasi

Sub kegiatan Peningkatan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 75.205.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 67.123.100,- (89,25%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.

Sub kegiatan Peningkatan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, meliputi :

1. Evaluasi Kelembagaan/Restrukturisasi
2. Penyederhanaan Birokrasi
3. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, yakni Anjab, ABK, Peta Jabatan, Penetapan Kelas Jabatan dan penerapan TPP.

Secara ringkas pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, sebagai berikut :

#### 1. Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan/Restrukturisasi

Evaluasi terhadap kelembagaan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dimaksudkan menganalisis potensi

urusan dan kewenangan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kondisi eksisting kelembagaan perangkat daerah. Adapun tujuannya untuk memberikan rekomendasi penataan perangkat daerah sesuai hasil evaluasi kelembagaan serta memperbaiki, menyesuaikan dan menyempurnakan struktur organisasi sesuai dengan lingkungan strategis untuk dijadikan acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun perbaikan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka persiapan Evaluasi Kelembagaan, telah dilakukan rapat persiapan pada Senin, 15 Februari 2021 di Ruang Kerja Kepala Bagian Organisasi. Pembahasan meliputi teknis dan fokus kegiatan, yakni untuk mengevaluasi struktur dan uraian tugas perangkat daerah baik yang akan berdiri sendiri dan yang harus digabung berdasarkan perumpunannya.

Secara teknis, asistensi dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama untuk 15 (lima belas) perangkat daerah yang eksis sebelum evaluasi kelembagaan dan dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 11 Maret 2021, bertempat di ruang rapat Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banjar. Sedangkan tahap kedua untuk 18 (delapan belas) perangkat daerah yang dimungkinkan mengalami perubahan/penggabungan dan dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 25 Maret 2021, bertempat di ruang rapat Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banjar/Mini Barakat dan Aula Barakat.

Untuk Sekretariat Daerah tidak dibahas karena sudah mengalami perubahan pada 2019 dan menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Evaluasi terhadap struktur organisasi dengan memperhatikan:

- Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Skor hasil pemetaan urusan menentukan jumlah bidang maupun seksi/sub bidang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
- Mempertimbangkan aspek beban kerja dan kebutuhan setiap urusan pada masing-masing bidang.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Penggabungan Urusan Pemerintahan dengan kriteria :
  - Kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau
  - Keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
  - Perumpunan urusan pemerintahan meliputi :

- a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
- b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- e. komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
- g. perpustakaan dan kearsipan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi kelembagaan terdapat perubahan struktur/restrukturisasi dari 34 perangkat daerah menjadi 26 perangkat daerah (salah satunya, yaitu RSUD yang merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan yang bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah).

Restrukturisasi dilakukan dalam upaya efektifitas dan efesiensi, dengan point utama adalah azas efektifitas, tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Baru setelahnya berbicara efesiensi dalam rangka terwujud lembaga organisasi yang miskin struktur kaya fungsi. Restrukturisasi tersebut disampaikan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada tanggal 24 Nopember 2021.

Memperhatikan Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 061/01057/ORG Hal Fasilitasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar tanggal 21 Juli 2021 dan setelah adanya Berita Acara Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor: 03/84/DPRD/2021/Nomor: 180/479/KUM/2021 tanggal 29 September 2021 maka disusunlah Rancangan Peraturan Bupati Banjar tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.

Sebagai tahap awal, ditetapkannya Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.4/57/KUM/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Banjar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar tanggal 18 Oktober 2021 dan telah dilaksanakan asistensi restrukturisasi kelembagaan pada Kamis, 28 Oktober 2021 di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan hasil sebagai berikut :

- Perbup mengenai sotk agar digabung menjadi 1 (satu) produk hukum, tidak per perangkat daerah sebagaimana saat ini.
- Untuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berdasarkan UU tentang Cipta Kerja Nomor 11/2020 dan PP tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Nomor 16/2021, Urusan Pemerintahan (UP) Bidang Penanaman Modal wajib diwadahi dalam Perangkat Daerah Mandiri (tidak digabung deengan UP Bidang lainnya, jadi hanya DPMPSTP).
- Sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibentuk terpisah.
- Untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pemukiman dan Perhubungan serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, UP Bidang PUPR disarankan untuk digabung dengan UP Bidang Pertahanan, karena memiliki kedekatan karakteristik tugas dan fungsi.
- UP Bidang Perkim disarankan untuk digabung dengan UP Bidang Lingkungan Hidup karena memiliki persamaan tugas dan fungsi terkait penyediaan sarana dan prasarana untuk lingkungan dan persampahan.
- UP Bidang Perhubungan disarankan untuk diwadahi dalam Perangkat Daerah Mandiri.
- Untuk Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, disarankan untuk melakukan Analisa lebih lanjut, apakah beban kerja masing-masing UP memungkinkan untuk dilakukan penggabungan 3 (tiga) UP dalam 1 (satu) Perangkat Daerah.
- UP Bidang Sosial jika memungkinkan diwadahi dalam Perangkat Daerah Mandiri, mengingat merupakan UP Pelayanan Dasar Wajib serta mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Banjar yang cukup padat sehingga akan banyak menimbulkan kerentanan dan kerawanan sosial.
- Untuk dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, UP Bidang Kebudayaan jika memungkinkan digabung, dengan UP Bidang Pendidikan untuk sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian)

- Nomenklatur diubah menjadi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020.
- RSUD merupakan bagian dari Dinas Kesehatan yang merupakan UPTD namun bersifat khusus. Sehingga perlu finalisasi struktur organisasi perangkat daerah karena sebagai lampiran perbup mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, telah dilaksanakan Rapat Finalisasi Penyusunan Struktur Organisasi pada Kamis, 25 Nopember 2021 di Aula Mini Barakat. Berdasarkan hasil pelaksanaan penyusunan raperbup, terdapat beberapa masukan dari Perangkat Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan Telaahan Staf Kepala Bagian Organisasi Nomor 065/047/ORG tanggal 2 Desember 2021 Hal Usulan Penetapan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar. Usulan ini telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah tanggal 24 Desember 2021 dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha tanggal 24 Desember 2021. Dengan adanya restrukturisasi kelembagaan tersebut, terdapat pengurangan 7 (tujuh) jabatan pimpinan tinggi, 17 (tujuh belas) jabatan administrator dan 38 jabatan pengawas. Namun sehubungan dengan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, maka tim juga menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati Banjar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar dengan model struktur yang sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/467/KT.01/2021 tanggal 27 Mei 2021 Hal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## 2. Penyederhanaan Birokrasi

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/1970/OTDA tanggal 26 Maret 2021 perihal Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, tim Bagian Organisasi melakukan identifikasi penyederhanaan Birokrasi pada 13 s.d 15 April 2021 di Bagian Organisasi melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 060/480/ORG tanggal 9 April 2021 perihal Undangan Asistensi Identifikasi Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.

Kegiatan dilanjutkan dengan adanya asistensi dari Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Selatan pada 26 s.d 27 April 2021 melalui Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 061/00559/ORG tanggal 16 April

2021 Hal Pelaksanaan Asistensi Proses Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan hasil :

- Jabatan fungsional yang digunakan sebagai pilihan adalah yang sudah memiliki ketentuan hukum yang pasti (memiliki PermenPANRB dan Perpres tunjangan).
- Jabatan Struktural pada masing-masing Perangkat Daerah yang disetarakan ditulis secara keseluruhan meskipun pejabatnya dalam keadaan lowong.
- Pelaksana Tugas pada jabatan pengawas tidak dapat diikutkan dalam penyetaraan jabatan.
- Batas Usia Pensiun diisi dengan tanggal batas waktu pejabat yang bersangkutan pensiun pada jabatan struktural pengawas (misalnya 01 Maret 2025).
- Kelas Jabatan Fungsional disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pejabat Struktural yang sebelumnya pernah menduduki Jabatan Fungsional dapat disebutkan nama jabatan beserta jenjangnya dengan menambahkan kolom keterangan (kolom 14).
- Matriks Identifikasi Usulan Penyetaraan Jabatan pada lembar terakhir ditandatangani oleh Kepala Daerah atau oleh Sekretaris Daerah (a.n. Kepala Daerah).
- Lembar Rekapitulasi disusun untuk memberikan kemudahan pemangku kepentingan mengetahui gambaran umum hasil identifikasi Jabatan Struktural yang akan ditransformasikan menjadi Jabatan Fungsional.
- Data usulan penyetaraan jabatan dalam bentuk softcopy disimpan dengan program excel dan disatukan dalam 1 (satu) file, bukan terpisah-pisah berdasarkan file masing-masing Perangkat Daerah.
- Untuk jabatan fungsional yang tidak ada peraturan mengenai tunjangannya maka diusulkan nama fungsionalnya dengan cara digandengkan dengan analis kebijakan atau jabatan fungsional lain yang ada perpres tunjangannya.

Kegiatan asistensi ditindaklanjuti kembali dengan adanya Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 061/00676/ORG tanggal 7 Mei 2021 Hal Tindaklanjut Hasil Asistensi Proses Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan agar Pemerintah Kabupaten/Kota menyerahkan dokumen hasil identifikasi paling lambat tanggal 21 Mei 2021. Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyerahan Dokumen Penyederhanaan Birokrasi melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 060/659/ORG tanggal 21 Mei 2021 perihal Penyampaian Data Hasil Identifikasi Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.

Dengan adanya Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 061/00875/ORG tanggal 21 Juni 2021 Hal Perubahan Jadwal Penyerahan Berkas dan Konsultasi Penyederhanaan Organisasi di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan, maka Pemerintah Kabupaten Banjar yang diwakili oleh Kepala Bagian Organisasi pada 24 s.d 26 Juni 2021 di Kementerian Dalam Negeri telah mendapat validasi untuk Penyederhanaan Struktur Organisasi dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi dengan usulan yang disetujui untuk disederhanakan adalah 348 dari 350 jabatan administrasi yang disederhanakan berdasarkan model KemenPAN dan RB.

Adapun Kelengkapan berkas sebagaimana hasil validasi di Kemendagri telah disampaikan melalui Surat Bupati Banjar Nomor 061/800/ORG tanggal 28 Juni 2021 Perihal Pengusulan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Struktur sebagaimana dimaksud berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/3484/OTDA tanggal 31 Mei 2021 Hal Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021. Sehingga Persetujuan diterima dengan adanya Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 061/4249/OTDA tanggal 29 Juni 2021 Hal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan adanya persetujuan PSO, Biro Organisasi melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 061/01227/ORG tanggal 2 September 2021 Hal Asistensi Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang SOTK dan Usulan Penyetaraan Jabatan (PJ), Kabupaten Banjar mendapat asistensi pada 6 September 2021 di Biro Organisasi dengan hasil sebagai berikut :

- Terdapat beberapa catatan untuk penyederhanaan struktur organisasi sesuai dengan Lampiran II Surat Mendagri tentang PSO Revisi Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Kesepakatannya untuk wilayah kassel adalah bahwa seluruh fungsi kesekretariatan tetap dipertahankan.
- Pada Sekretariat Daerah, perubahan data pada Bagian Umum serta Bagian Perencanaan dan Keuangan yang dipertahankan seluruhnya, kemudian pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan hanya Sub Bagian Protokol yang dipertahankan. Sedangkan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa disederhanakan.
- Untuk Dinas Perhubungan, agar dikoordinasikan kembali struktur yang akan disederhanakan, apakah Seksi Fasilitas Perhubungan Darat atau Seksi Manajemen dan Rekayasa Perhubungan Darat.
- Untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP, eselon III diusulkan untuk dipertahankan.
- Untuk sementara, Jabatan yang seharusnya disederhanakan adalah 352, namun diusulkan adalah 299.

- Untuk draf Perbup tuisi, nomenklatur menyesuaikan daftar lampiran Penyederhanaan struktur organisasi, namun untuk RSUD dibuatkan Perbup sendiri.
- Untuk fungsi perangkat daerah dapat diuraikan. Sedangkan pada tugas pokok cukup dibunyikan global.
- Daftar penyetaraan jabatan agar menyesuaikan hasil perbaikan dari Penyederhanaan struktur organisasi.
- Untuk jabatan fungsional yang tidak ada peraturan mengenai tunjangannya maka diusulkan nama fungsionalnya dengan cara digandengkan dengan analis kebijakan atau jabatan fungsional lain yang ada perpres tunjangannya.
- Untuk dinas pada urusan penunjang seperti jabatan analis SDM aparatur juga belum ada peraturan mengenai tunjangannya.
- Kelas jabatan agar dicek kembali, karena ada beberapa jabatan fungsional untuk jenjang muda sudah di kelas 10.

Adapun dokumen Penyetaraan Jabatan (PJ) yang diusulkan adalah sesuai dengan PSO dan posisi terakhir setelah pelantikan Pejabat Pengawas melalui Surat Bupati Banjar Nomor 061/1257/ORG tanggal 27 Oktober 2021 Perihal Usulan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar sebanyak 298 Jabatan dari 348 Jabatan Administrasi karena 50 jabatan yang masih lowong.

Usulan tersebut disetujui dengan adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/8526/OTDA tanggal 24 Desember 2021 perihal Persetujuan Penyetaraan jabatan di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan dan Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 061/01932/ORG Tanggal 28 Desember 2021 Perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan (PJ) di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Menindaklanjuti persetujuan teknis, maka :

1. Telah dilakukan pelantikan pejabat fungsional dari penyetaraan jabatan di Kabupaten Banjar provinsi Kalimantan Selatan, pada Hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2021. Dimana Pejabat yang dilantik sebanyak 84 orang dari 98 Jabatan.
2. Pelantikan dilakukan untuk jabatan pengawas yang tidak berubah (nomenklatur dan nama pejabat pengawas) karena terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Pejabat pengawas pada Perangkat Daerah yang disetarakan adalah :
  - Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - DPMPTSP - BPBD - RSUD Ratu zalecha - Dinas kesehatan (UPTD Puskesmas)
4. Jabatan yang mengalami perubahan akan diusulkan untuk dilakukan tahapan PSO dan PJ.
5. Terbitnya Perda Kab. Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah, menyebabkan efisiensi/perampingan SOTK perangkat daerah sebanyak :

NO	Uraian	SOTK lama	SOTK Baru	-/+	Ket
1.	Perangkat Daerah				Pengabungan 8 PD, pembentukan 1 PD (Dinas Damkar dan penyelamatan)
	Dinas/badan	33	26	-7	
	Kecamatan	20	20	-	
	RSUD Raza	1	1	-	
	<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>47</b>	<b>-7</b>	
2.	JPTP dan Jabatan Administrasi				
	JPTP	40	33	-7	
	Jabatan Administrator	200	183	-17	
	Jabatan Pengawas	654	567	-87	
	<b>Total</b>	<b>894</b>	<b>783</b>	<b>-111</b>	

6. Telah dilaporkan pelaksanaan PJ kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Bupati Nomor 061/1578/ORG tanggal 31 Desember 2021 perihal Laporan Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan (PJ) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.
7. Dengan adanya restrukturisasi, maka tim kembali mengusulkan PSO dan PJ kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Bupati Nomor 061/1579/ORG tanggal 31 Desember 2021 perihal Usulan Revisi Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar dan Surat Bupati Nomor 061/1580/ORG tanggal 31 Desember 2021 perihal Usulan Penyetaraan Jabatan (PJ) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.

#### **b. Kegiatan Penataan Manajemen Sumber Daya Aparatur**

##### **a. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja**

Perbaikan terhadap analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan akan disesuaikan sebagai dampak restrukturisasi kelembagaan pada Tahun 2022 begitu juga dengan input pada aplikasi e-formasi dilaksanakan setelahnya.

Proses pembuatan anjab dan ABK untuk proses mutasi ASN baik mutasi masuk ataupun mutasi keluar dilakukan secara berkala berdasarkan surat permintaan dari BKDPSPDM, proses rutin ini dilakukan oleh JF analisis kepegawaian maupun pelaksana analisis jabatan. Secara keseluruhan, total permintaan data anjab ABK untuk mutasi rata-rata per triwulan sebanyak 15 orang lebih.

##### **b. Penetapan Kelas Jabatan**

Penetapan Kelas Jabatan diperlukan karena adanya :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.

- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sehingga terdapat perubahan nomenklatur untuk jabatan pimpinan tinggi pratama.
- d. Peraturan Bupati Banjar Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar pada Pasal 13 (1) bahwa Kepala UPTD Kelas B adalah Jabatan Pengawas/ Eselon IV b.
- e. Pada Peraturan Bupati Banjar Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, Lampiran A Daftar Kelas Jabatan Struktural belum termuat kelas jabatan untuk Kepala UPTD dengan klasifikasi Kelas B. Eselon IV b pada Lampiran A Daftar Kelas Jabatan Struktural termasuk Kelas 8 (delapan).
- f. Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1662/KA/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 Hal Perubahan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- g. Surat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 392/BSSN/D4/ KP.06.05/02/2021 tanggal 08 Februari 2021 Hal Perubahan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Fungsional Sandiman.
- h. Surat Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11929/SES/BD.04/B/09/2021 tanggal 27 September 2021 Hal Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Perencana.
- i. Berdasarkan huruf f, g dan h perlu penyesuaian kelas jabatan pada fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Sandiman dan Perencana.

Berdasarkan hal tersebut di atas ditetapkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar tanggal 26 Nopember 2021.

Tahapan penetapan kelas jabatan dilakukan melalui beberapa tahapan yakni :

- Melakukan identifikasi kelas jabatan sesuai dengan jenis jabatan yakni struktural, fungsional dan pelaksana
- Khusus jabatan fungsional, identifikasi kelas jabatan berdasarkan surat keputusan/penetapan instansi pembina.
- Menyusun draf Peraturan Bupati Banjar tentang Kelas Jabatan

- Rapat tim pembahasan draf Peraturan Bupati Banjar tentang Kelas Jabatan
- Finalisasi pembahasan draf Peraturan Bupati Banjar tentang Kelas Jabatan
- Penetapan draf Peraturan Bupati Banjar tentang Kelas Jabatan menjadi Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

**c. Penerapan TPP**

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4834/SJ tanggal 06 September 2021 Hal Tunjangan Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2021 Sub Indikator Evaluasi Jabatan, Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Semester Kedua Tahun 2021 serta Validasi Perhitungan Pemberian TPP Tahun 2022, telah dilaksanakan rapat pembahasan pemberian TPP Tahun 2022 pada Senin, 1 Nopember 2021 di Ruang Rapat Mini Barakat melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 061/1280/ORG tanggal 29 Oktober 2021 dengan hasil sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Ketentuan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pada penjelasan halaman 199 Belanja Pegawai pada angka :
  - Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD
  - Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
  - Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30%, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 tahun.

Disepakati untuk dilakukan penyesuaian 30% pada tahun kelima.

- b. Besaran TPP yang diterima sama dengan tahun sebelumnya maka KKD yang akan dinaikan menjadi (100%).
- c. TPP Dinaikkan khusus struktural dengan menyesuaikan kondisi penyederhanaan birokrasi (beban pada JA) dengan alasan kenaikan honorarium PNS dibatasi sesuai ketentuan Perpres 33 Tahun 2020.
- d. Mengenai kenaikan TPP Jabatan Struktural, dilakukan penaikan JPT (kondisi maksimal) maka diberikan TPP Kelangkaan Profesi yang akan ditetapkan dengan SK Bupati. Juga dinaikkan

- keseluruhan JA penyesuaian kenaikan JPT dan kondisi penyederhanaan birokrasi (beban pada JA).
- e. Mengenai Kenaikan TPP JF PBJ, dilakukan sama dengan JA.
  - f. Mengenai Kenaikan TPP JF Auditor, dilakukan sama dengan JA.
  - g. Tidak ada honorarium tim, kecuali sesuai Perpres No. 33 Tahun 2020 (TAPD)
  - h. Hasil MCP KPK, berdasarkan kinerja Masih menggunakan aktivitas, sambil pengembangan aplikasi sehingga berbasis kinerja akan ditetapkan kemudian
  - i. Menggunakan aplikasi yang terintegrasi dengan data simpeg dan gaji/tunjangan.
  - j. Penggunaan aplikasi e-kinerja secara utuh meliputi kehadiran (e-sejati), aktivitas harian dan capaian kinerja yang terhubung langsung dengan capaian SKP perorang, dengan tampilan jumlah uang yang akan didapat.
  - k. Mengenai Perbup TPP, Jika menggunakan aplikasi yang sudah ada, maka cukup revisi perbup yang sudah ada.
  - l. TPP bagi Pejabat pengawas yang akan dialihkan pada pengalihan jabatan kegiatan penyederhanaan birokrasi, maka selisih akan dimasukkan pada TPP Pertimbangan Objektif lainnya.
  - m. Dilakukan pembulatan besaran TPP bagi beberapa jabatan. Sekretaris Daerah 40.000.000,-, Inspektur 20.000.000,-.
  - n. Struktur sebagaimana terlampir dalam notulen ini, selanjutnya dijadwalkan besok untuk rapat tindaklanjut terkait dampak dari perda perubahan Perangkat Daerah bersama dengan perangkat daerah terkait seperti BPKAD dan BKDPSDM.
  - o. Diusulkan untuk penundaan pembayaran TPP karena pemenuhan kewajiban untuk input data/penyampaian laporan yang melewati batas waktu yang ditentukan, sehingga menjadi pasal 12B.

Berdasarkan hasil rapat, maka ditetapkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/448/KUM/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar tanggal 22 Nopember 2021 serta Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/456/KUM/2021 tentang Kriteria Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar tanggal 30 Nopember 2021.

Tim melakukan perhitungan TPP Kabupaten Banjar Tahun 2022 dengan hasil besaran bobot 0,663 dan besaran TPP yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar tanggal 1 Desember 2021.

Faktor Pendorong keberhasilan ini karena :

1. Terbitnya ketentuan Penyederhanaan Birokrasi yakni Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PAN dan RB

Nomor 25 Tahun 2021 sebagai pedoman yang jelas dalam proses pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi, yakni Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan.

2. Adanya Tim yang solid serta koordinasi yang intens sehingga proses pelaksanaan subkegiatan Peningkatan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditentukan.
3. Kerjasama seluruh perangkat daerah dalam upaya pemenuhan data terkait subkegiatan Peningkatan Kelembagaan dan Analisis Jabatan sehingga permintaan data oleh Pemerintah Pusat dapat diselesaikan tepat waktu.

Upaya peningkatan keberhasilan adalah membuat/membangun sistem secara online Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, sehingga proses pemenuhan data Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia dapat lebih cepat dan tepat.

#### B. Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

No	Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun n Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Program Penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota kegiatan Penataan Organisasi</b>	-	-	100 %	100 %	100	100 %	100
	Sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	100

Sub kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan anggaran sebesar Rp. 169.549.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 130.920.952,- (77,22%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.

Sub kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana, meliputi :

1. Pelayanan publik, yakni evaluasi pelayanan publik, SKM, Inovasi.
2. Tata Laksana, yakni Proses Bisnis, SOP, Sistem kerja.

Secara ringkas pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana, sebagai berikut :

##### 1. Pelayanan Publik

###### a. Evaluasi pelayanan publik

Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 berdasarkan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/249/PP.02/2021 perihal Penyampaian jadwal pelaksanaan Evaluasi

Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2021. Locus Evaluasi Pelayanan Publik pada Kabupaten Banjar pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perangkat Daerah terpilih memulai kegiatan dengan tahapan:

1. mengisi lengkap isian F.01 beserta bukti dukung melalui website <https://sipp.menpan.go.id/webcontrol/login> sesuai batas waktu yang ditentukan. Dalam setiap proses pengisian isian F-01 serta pemenuhan kelengkapan alat bukti, Bagian Organisasi secara intens selalu melakukan pendampingan.
2. menyebarkan kuisisioner F-03 kepada masyarakat pengguna layanan minimal 10 (sepuluh) orang.
3. Penilaian secara langsung kepada Locus Evaluasi Pelayanan Publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik yang hal ini diwakili oleh Biro Organisasi Kalimantan Selatan. Setelah dilakukan peninjauan serta penilaian secara langsung, Perangkat Daerah diminta untuk melakukan perbaikan serta pemenuhan hal-hal yang masih di anggap kurang.
4. Ekspose Pelayanan Publik Tahun 2021 dilaksanakan di Jakarta berdasarkan Surat dari Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:065/0839/ORG perihal Pelaksanaan Ekspose Pelayanan Publik Tahun 2021. Kabupaten Banjar mengirimkan Tim yang terdiri dari 2 Perangkat Daerah dan Pendamping dari Bagian Organisasi yaitu :
  - i) Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
  - ii) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - iii) Bagian Organisasi oleh Kepala Bagian dan Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Pelaksanaan Ekspose dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 10 November 2021 bertempat di Intercontinental Jakarta Pondok Indah Jalan Metro Pondok Indah Kav.IV Kabayoran Lama, Jakarta Selatan.

Laporan Hasil Pelaksanaan Ekspose Evaluasi Pelayanan Publik sebagai berikut ; Penyelenggaraan pelayanan publik sampai saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Berbagai upaya perbaikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya belum maksimal. Sementara itu, masyarakat menuntut hak-hak mereka ketika berhubungan dengan penyelenggara pelayanan publik agar memberikan pelayanan yang prima. Dalam rangka memaksimalkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut, diperlukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara periodik. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf c Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi kinerja

penyelenggara pelayanan publik mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik tersebut menjadi acuan bagi Pembina/Penanggungjawab penyelenggara pelayanan publik guna memperbaiki, dan menyempurnakan layanan yang sesuai dengan aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Tujuan dilakukan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik, yaitu : 1) Mengetahui capaian kinerja penyelenggara pelayanan publik. 2) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan hasil evaluasi. 3) Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Evaluasi kinerja terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan pada 1 (satu) atau beberapa jenis layanan sekaligus dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, kemudian melakukan perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai salah satu tolak ukur dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan transparan serta memenuhi harapan masyarakat, Kementerian PAN-RB mengagendakan penilaian terhadap instansi pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga yang dinamakan Evaluasi Unit Pelayanan Publik (EUPP). Berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, untuk menilai kinerja instansi terhadap pelayanan publik, digunakan Indeks Pelayanan Publik berdasarkan pada aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana prasarana, SIPP, layanan konsultasi dan pengaduan serta inovasi. Adapun penjelasannya adalah:

- a. Kebijakan Pelayanan adalah visi, misi, komitmen, itikad dan perilaku organisasi yang terlembagakan dalam bentuk aturan, mekanisme, atau proses yang dijalankan organisasi sebagai upaya untuk mencapai kualitas pelayanan tertentu sesuai tujuan pemberian pelayanan publik.
- b. Profesionalisme Sumber Daya Manusia adalah standar kualifikasi, capaian kualitas dan kinerja personel pemberi layanan publik yang dibangun institusi penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang prima (terbaik).
- c. Sarana Prasarana adalah sarana prasarana pendukung pemberian pelayanan publik baik berupa fasilitas, tempat maupun perlengkapan tertentu yang menunjang pelayanan publik yang diberikan.
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta

mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf *Braille*, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

- e. Konsultasi adalah mekanisme interaktif antara pemberi layanan dan pengguna layanan untuk menyelesaikan persoalan tertentu baik sebelum atau pada saat pelayanan diberikan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.
- f. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain berdasarkan pada enam aspek tersebut di atas, Indeks Pelayanan Publik berprinsip pada keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dayaguna dan aksesibilitas, maksudnya adalah :
  - Keadilan (*Fairness*) merupakan kondisi dimana kebijakan dan pemberian layanan publik memberikan kesamaan hak dan persamaan perlakuan bagi semua orang (tanpa diskriminatif) terhadap status, ras, agama maupun jenis kelamin, namun memberikan perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat rentan, mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap orang, serta memberikan kepastian hukum.
  - Partisipasi (*participation*) adalah tingkat keterlibatan (peran serta) masyarakat dalam pembuatan kebijakan, perencanaan, implementasi serta monitoring (pengawasan) dan evaluasi pelayanan publik. Termasuk peran serta penyusunan standar pelayanan dan pemberian penghargaan.
  - Akuntabilitas (*accountability*) adalah kondisi dimana pejabat, lembaga dan organisasi pelayan publik bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya serta responsif terhadap publik.
  - Transparansi (*transparency*) adalah kondisi dimana keputusan yang diambil oleh pejabat pelayan publik serta proses pelayanan terbuka kepada publik untuk memberi masukan, memonitor dan mengevaluasi serta kondisi dimana informasi publik tersebut tersedia maupun dapat diakses oleh publik. Dengan demikian publik sebagai pemanfaat layanan, lebih memahami hak dan tanggungjawabnya.

- Berdayaguna (*useful*) adalah kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik telah mengutamakan kepentingan umum, telah menggunakan sumber daya manusia, keuangan dan waktu secara optimal dan ekonomis (*efficiency*), serta telah dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan (*effectiveness*).
- Aksesibilitas (*accessibility*) merupakan kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik mudah, sederhana (tidak birokratis dan berbelit), murah, dan terjangkau, oleh semua lapisan masyarakat baik dari sisi strata sosial ekonomi maupun kewilayahan.

Berdasarkan aspek dan prinsip tersebut, suatu instansi yang akan mengikuti penilaian EUPP tentunya harus mempersiapkan keenam aspek dan mempertimbangkan prinsip-prinsip di atas. Pada dasarnya, Unit Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Banjar sudah mempertimbangkan dan melibatkan aspek-aspek dalam pelayanan publik sebagaimana Peraturan Menpan RB Nomor 17 tahun 2017 bahkan sejak bergulirnya reformasi birokrasi Kementerian Keuangan tahun 2007 (Reformasi Birokrasi jilid II). Standard pelayanan, SDM, sarana prasana, konsultasi dan pengaduan sudah dibangun sejak Reformasi Birokrasi jilid II melalui pilar proses bisnis, antara lain melalui penetapan dan penyempurnaan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang memberikan kejelasan dan memuat janji layanan, dilakukannya analisa dan evaluasi jabatan, penerapan sistem peringkat jabatan, dan pengelolaan kinerja berbasis *balance scorecard* serta pembangunan berbagai sistem aplikasi *e-government* dan pilar SDM, antara lain melalui peningkatan disiplin, pembangunan *assessment center*, diklat berbasis kompetensi, pelaksanaan *merit system*, penataan sumber daya manusia, pembangunan SIMPEG, dan penerapan *reward and punishment* secara konsisten serta pilar organisasi, antara lain melalui penajaman tugas dan fungsi, pengelompokan tugas-tugas yang koheren, eliminasi tugas yang tumpang tindih, dan modernisasi kantor baik di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, dan fungsi-fungsi keuangan negara lainnya. Terkait sarana dan prasarana, kini instansi vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan sudah memadai dan memberikan kemudahan dan rasa nyaman bagi para pengguna layanan / *stakeholder* apalagi sarana dan prasarana tersebut telah dibangun dengan berbagai konsep, misalnya pengarusutamaan gender atau yang lainnya. Layanan konsultasi dan pengaduan tidak luput menjadi perhatian. Bagi para pengguna layanan dan masyarakat telah tersedia layanan konsultasi dan pengaduan yang tersedia baik secara *online* maupu *offline*. EUPP akan menumbuhkan

keaktivitas dari setiap instansi dalam hal ini, inovasi yang ditujukan untuk kemudahan para pengguna jasa dan masyarakat pada umumnya dan memberikan ruang bagi keterbukaan akses informasi. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, EUPP merupakan salah satu strategi dalam memberikan pelayanan prima.

Evaluasi pelayanan publik dilaksanakan secara berjenjang, yakni pelaksanaan penilaian mandiri oleh unit pelayanan bersangkutan dengan melakukan pengisian F1 pada EUPP tahapan awal yang kemudian dilakukan dialog atau evaluasi internal oleh instansi ybs dengan bagian organisasi. Selanjutnya dilakukan evaluasi oleh tim evaluasi pelayanan publik Propinsi Kalimantan Selatan sebagai perwakilan pusat di daerah. Yang dilakukan secara menyeluruh melalui aplikasi online dan datang secara langsung untuk melihat dan memonitoring berbagai fasilitas dan kelengkapan untuk pelayanan publik. Hasilnya kemudian dimasukkan kedalam F2 sebagai bentuk akhir atas penilaian tim propinsi. Untuk memaksimalkan hasil penilaian atas evaluasi propinsi maka dilakukan *sharering* sesion bersama tim pusat dari KemenpanRB untuk memastikan hasil evaluasi propinsi dan menjadi hasil akhir atas penilaian unit pelayanan publik. Pada kegiatan dengan tim evaluator pusat yang dihadiri langsung oleh asisten deputi pelayanan publik kemenpanRB dilakukan pemaparan secara langsung upaya pelayanan publik yang diberikan dengan menyampaikan bukti dukung semua kegiatan dan upaya-upaya yang dilakukan unit dalam memuaskan masyarakat sehingga terciptanya pelayanan prima. Setelah itu dilakukan tanya jawab atas pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan agar penilaian evaluasi pelayanan publik dapat dinilai secara menyeluruh.

**b. Penyusunan Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat**

Kegiatan Penyusunan dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Banjar Tahun 2021 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dimulai dengan dilakukan acara Sosialisasi pada hari Selasa 28 September 2021 dengan hasil sebagai berikut :

- Acara dibuka oleh Asisten Administrasi Umum
- Acara Sosialisasi dibagi menjadi 3 Sesi
  - Sesi pertama untuk 34 Perangkat Daerah (Dinas)
  - Sesi kedua untuk 20 Kecamatan dan 13 Kelurahan
  - Sesi Ketiga untuk 24 Puskesmas
- Pada Sesi Pertama disampaikan Paparan mengenai Survei Kepuasan Masyarakat oleh Kepala Bagian Organisasi.

- Dilakukan diskusi dan tanya jawab mengenai proses pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Perangkat Daerah.
  - Kabid Kadinkes menyampaikan alasan tentang menurunnya angka capaian IKM Puskesmas dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 serta berubahnya Pola Pelayanan yang mengharuskan menggunakan Protokol Kesehatan dan juga dengan adanya Pengaturan jumlah Petugas dan Jam Pelayanan.
  - RSUD Ratu Zaleha menyampaikan beberapa masalah di antaranya
    1. Pelaksana SDM yang akan melakukan survei yang kurang baik jumlah maupun kompetensinya.
    2. Standar biaya untuk pelaksanaan Survei yang berbeda dengan Standar biaya dari Pihak Ketiga
    3. Memerlukan pelatihan bagi Enomurator (Diklat)
      - Dinas Perindustrian menyampaikan pertanyaan mengenai unsur pertanyaan dalam SKM yang menyebutkan adanya Biaya atau tidak sedangkan di Dinas Perindustrian ada memungut retribusi yang sesuai dengan Peraturan sehingga unsur Biaya ini menjadi sangat tinggi hasilnya. Kemudian diperoleh jalan keluar untuk menuliskan Definsi Operasional (DO) pada setiap unsur sehingga memudahkan responden untuk memahami setiap pertanyaan.
      - Dinas Pendidikan menyampaikan untuk menambahkan jumlah pertanyaan disesuaikan dengan keperluan dengan catatan hasil akhirnya tetap merujuk pada 9 unsur SKM.
- Pada Sesi kedua disampaikan Paparan mengenai hasil survei kepuasan masyarakat kabupaten oleh Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Dilakukan diskusi dan tanya jawab mengenai proses pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan dan Kelurahan dengan kesimpulan:
  - Untuk memudahkan responden yang berbagaimacam latar belakangnya maka pada Kuisisioner ditambahkan dengan bahasa daerah dan diberikan juga definisi operasional berdasarkan layanan yang diberikan di kecamatan dan kelurahan
  - Menyeragamkan SOP pada kecamatan dan kelurahan
  - Penentuan jumlah responden yang dulunya ada batas minimal 150, dikoreksi bahwa jumlah responden disesuaikan dengan jumlah kunjungan masyarakat atau pengguna layanan yang berkunjung dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Bupati Banjar nomor 59 tahun 2020 dan atau menggunakan tabel Sampel Morgan dan Krejcie.Kesimpulan dari kegiatan Sosialisasi diperoleh:

- perlu adanya keseragaman bentuk dan format Kuisisioner berdasarkan kelompok Unit Penyelenggara Pelayanan.
- menambahkan Definisi Operasional terhadap setiap unsur pertanyaan dalam Survei Kepuasan Masyarakat, serta menggunakan Bahasa yang mudah dimengerti oleh responden.
- Penggunaan media online seperti Google Form atau Form lainnya untuk memudahkan dalam melakukan Survei.

Tahapan selanjutnya dalam rangka penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Banjar adalah dengan mengirimkan Surat kepada seluruh Perangkat Daerah tentang batas akhir penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat pada masing-masing daerah kepada Bagian Organisasi dengan Surat Bupati Banjar nomor : 067/ 1157 /ORG pertanggal 6 Oktober 2021. Setelah Batas akhir pengumpulan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Perangkat Daerah, maka pada bulan Desember 2021 mulai dilakukan kegiatan penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Banjar Tahun 2021.

#### c. Inovasi

Kegiatan Inovasi di Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana yaitu melakukan pendampingan dan penginputan Inovasi dari Perangkat Daerah ke dalam Sistem Inovasi Pelayanan Publik pada alamat <https://sinovik.menpan.go.id> dengan tahapan sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada Perangkat Daerah yang memiliki Inovasi dan masuk di dalam Lab Inovasi Intan Bakilau bekerja sama dengan Bapelitbang, antara lain :
  - Dinas tenaga kerja dan transmigrasi, website info kerja yaitu website info kerja yang dikhususkan secara langsung untuk memfasilitasi antara perusahaan dengan pencari kerja yang ada di kabupaten banjar terkait informasi, kebutuhan akan lowongan pekerjaan (*intan bakilau tahun 2020*) sosial media 'instagram facebook info kerja yaitu pemanfaatan sosial media (ig dan fanspage facebook) untuk memperluas informasi pasar kerja terutama di kabupaten banjar (*intan bakilau tahun 2020*)
  - Dinas peternakan dan perkebunan, telur awetan kemangi untuk peningkatan vitalitas (pengolahan produk peternakan melalui diversifikasi telur asin herbal kemangi) (*intan bakilau tahun 2017*) kawanku bungas (klinik hewanku baik unggul dan berkualitas) merupakan salah satu fasilitas layanan bagi masyarakat dalam bidang kesehatan hewan. (*intan bakilau tahun 2020*)
  - Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, gebrak's (gerakan bersama realisasi akses sanitasi) (*intan bakilau tahun 2017*)

- Dinas tanaman pangan dan hortikultura, banjar sapa plus (batanam banih jajar legowo sakali mawiwit dua kali panen plus) merupakan pola tanam yang memadukan varietas lokal dan varietas unggul dengan sistem pertanian modern yaitu menanam padi varietas unggul dan lokal dalam satu hamparan. (*intan bakilau tahun 2017 dan pernah diikuti di innovate government awards tahun 2019*) babaju banjar (batanam baputik baolah bajual kambang melati dan mawar banjar (*intan bakilau tahun 2019*))
- Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, intan banjar (itsbat nikah dapat buku nikah, akta kelahiran) ) (*intan bakilau tahun 2020*) tambak udang (datang melahirkan membawa akta kelahiran untuk dibawa pulang) ) (*intan bakilau tahun 2019 dan pernah diikuti di sinovik*) jemput pelanduk (*jemput bola pelayanan adminduk*).
- Dinas koperasi dan umkm, smart koperasi banjar ) (*intan bakilau tahun 2019*)
- Dinas perindustrian dan perdagangan, mamaline.id (martapura mall online) adalah sebuah aplikasi digital yang dibangun dalam bentuk aplikasi mobile (mamaline.id) yang dijadikan sebagai fasilitas jual beli secara online ) (*intan bakilau tahun 2020*)
- Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, sippadas (sistem pelayanan penyaluran administrasi dana desa) (*intan bakilau tahun 2017*) agustus 2019
- Dinas lingkungan hidup, gamis hijau (gerakan hari kamis menanam untuk menyelamatkan lingkungan hidup) kegiatan ini untuk memotivasi dan melibatkan masyarakat untuk ikut peduli dalam pelaksanaan penanaman pohon dan cinta lingkungan, pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan secara bijaksana untuk mengurangi degradasi lahan dan hutan. ) (*intan bakilau tahun 2017 dan pernah diikuti di innovate government awards tahun 2019*). forum kabupaten go green kabupaten banjar adalah membentuk kemitraan yang terpadu dan harmonis dalam bingkai kemitraan intan hijau) (*intan bakilau tahun 2017 dan pernah diikuti di innovate government awards tahun 2019*) pilot project gambut hanyar babungas (*intan bakilau tahun 2017*)
- Badan kesatuan bangsa dan politik, simantab (sistem informasi keamanan ketentraman dan ketertiban)
- Bagian hukum setda banjar, klinik hukum (*intan bakilau tahun 2017*)
- Upt. puskesmas martapura barat, aplus (aplikasi my posbindu) (*intan bakilau tahun 2019*)
- Upt.puskesmas gambut, peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak melalui kegiatan tapila (tanggung jawab pihak laki-

- laki) adalah para kader desa yang terdiri dari bapak-bapak dengan tujuan menanggulangi faktor-faktor yang berpengaruh pada pesakitan ibu dan bayi (*intan bakilau tahun 2019 dan pernah diikuti di innovate government awards tahun 2019*)
- Upt puskesmas martapura 1, tripikon-s alternative pemecahan masalah lahan untuk pembuatan septik tank jamban di daerah aliran/bantaran sungai, adalah pemecahan masalah lahan untuk pembuatan septik tank jamban di daerah aliran/bantaran sungai dalam rangka mempercepat stop buang air sembarangan (*pernah diikuti di innovate government awards tahun 2019 sipalui (sistem informasi puskesmas akurat langsung universal dan integrasi)*)
  - Kecamatan martapura barat, srt. khatulistiwa (*intan bakilau tahun 2020*)
  - Kelurahan mandarsari, pemberdayaan karang taruna purna praja bergaya bmw (berinovasi, mandiri,wirausaha) (*intan bakilau tahun 2020*)
2. Tahapan Seleksi dilakukan oleh Tim dari Bagian Organisasi, kemudian di input kedalam Sistem 9 Inovasi Kategori Umum dan 1 Kategori Replikasi yaitu:
- 1) Gebraks (Dinas Pupr)
  - 2) Jempol Pelanduk (Disdukcapil)
  - 3) Tambak Udang (Disdukcapil)
  - 4) Sistem Informasi Lihai (DLH)
  - 5) Gamis Hijau (DLH)
  - 6) Probably(DLH)
  - 7) Liter-Green(DLH)
  - 8) Bank Daur's Purna Praja (Kelurahan Mandar Sari)
  - 9) SiPalui (UPT PKM Martapura 1)
  - 10) Aplus (UPT PKM Martapura Barat)
3. Tahapan Penilaian Administrasi dan Kelayakan Inovasi maka masuk ke dalam Inovasi TOP 99 dan berhak maju ke tahap selanjutnya dan melakukan presentasi yaitu : Gebraks kategori Umum dan Jempol Pelanduk kategori Replikasi
4. Presentasi dan Wawancara Inovasi untuk berhak masuk ke dalam Inovasi Terpuji TOP 45 yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2021 bertempat di Command Center dan dihadiri oleh Bupati Banjar, Sekretaris daerah dan Kepala Bagian Organisasi, Kepala Dinas PUPR dan Kepala Bapelitbang serta seluruh Tim Inovasi Gebraks dan Jempol Pelanduk.
5. Berdasarkan Surat Pengumuman Deputy Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/i81/PP.00.05/2021 tentang Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Tahun 2021, diperoleh Inovasi GEBRAK'S (Gerakan Penghapusan Jamban Terapung ) oleh Dinas PUPR masuk kedalam TOP 45 Inovasi Terpuji.

Selanjutnya kepada para Inovator yang masuk lolos penilaian administrasi KIPP diberikan penghargaan sebagai Inovasi Daerah dan diberikan TPP sebesar 40% x 1 Bulan, dan yang masuk lolos ke tahapan TOP 99 dan diberikan TPP 50% x 1 Bulan. Dan juga diberikan Piagam Penghargaan pada Puncak Hari Jadi Kabupaten Banjar.

## 2. Tata Laksana

### a. Proses bisnis

Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Tujuan penyusunan peta bisnis proses agar setiap instansi pemerintah:

- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
- c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Manfaat peta proses bisnis adalah:

- a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Ruang Lingkup Penyusunan peta proses bisnis dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah. Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan instansi pemerintah

kabupaten sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.

Tahun 2021 pelaksanaan kegiatan terkait proses bisnis adalah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan proses bisnis kabupaten Banjar yang telah diterbitkan pada tahun 2020. Serta melakukan beberapa pendampingan penyusunan proses bisnis perangkat daerah atas permintaan perangkat daerah bersangkutan.

**b. Standar Operasional Prosedur**

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

manfaat SOP adalah:

- a. sebagai ukuran standar kinerja bagi ASN dalam menyelesaikan, memperbaiki serta mengevaluasi pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual ASN dan organisasi secara keseluruhan;
- d. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dari aspek mutu, waktu dan prosedur.

Prinsip SOP terdiri atas:

- a. kemudahan dan kejelasan, yaitu prosedur yang distandarkan harus mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua ASN;
- b. efisiensi dan efektifitas, yaitu prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas;
- c. keselarasan, yaitu bahwa prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait;
- d. keterukuran, yaitu output dari prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas (mutu) tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya;
- e. dinamis, yaitu prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan kualitas pelayanan;
- f. berorientasi pada pengguna, yaitu prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna;
- g. kepatuhan hukum, yaitu prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku; dan
- h. kepastian hukum, yaitu prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan, dan menjadi instrumen untuk melindungi ASN dari kemungkinan tuntutan hukum.

Prinsip pelaksanaan penyusunan SOP sebagai berikut:

- a. konsisten, yaitu harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapapun dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasi pemerintah;
- b. komitmen, yaitu harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi dari jenjang yang paling rendah sampai dengan yang tertinggi;
- c. perbaikan berkelanjutan, yaitu harus terbuka terhadap penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif;
- d. mengikat, yaitu harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan;
- e. seluruh unsur memiliki peran penting, bahwa seluruh ASN memiliki peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan; dan
- f. terdokumentasi dengan baik, bahwa seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik sehingga dapat selalu dijadikan referensi bagi setiap mereka yang memerlukan.

Setiap SKPD/perangkat daerah dari level tertinggi sampai level terendah wajib menyusun SOP sesuai dengan keluasan lingkup proses pekerjaan. SOP disusun dengan berpedoman pada tugas dan fungsi; dan uraian jabatan. Penyusunan materi SOP lingkup SKPD menjadi tanggungjawab SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Syarat SOP meliputi:

- a. menghasilkan paling sedikit 1 (satu) output tertentu;
- b. melibatkan minimal 2 (dua) orang;
- c. mengacu pada penjabaran tugas pokok dan fungsi;
- d. mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. memperhatikan SOP lainnya yang juga dibakukan; dan
- f. memperhatikan identifikasi kebutuhan SOP.

Siklus SOP meliputi: persiapan; penilaian kebutuhan; penyusunan; penerapan; dan monitoring dan evaluasi.

Pendampingan Penyusunan SOP pada masing-masing perangkat daerah tetap berjalan pada tahun 2021 yang melakukan pengusulan untuk penandatanganan Bupati adalah:

1. RSUD Ratu Zalecha
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3. Dinas Sosial
4. Dinas Perhubungan

### **c. Pengaturan sistem kerja**

Dengan masih adanya Pandemi Covid-19 yang mana berakibat pola dengan berubahnya Sistem kerja pada pemerintahan. Berdasar dari Surat Edaran dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka pada Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana juga mengeluarkan surat edaran terkait Pengaturan Sistem Kerja yaitu :

1. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor : 065/299/ORG Tentang Perubahan Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2021 pertanggal 1 Maret 2021.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 065/435/ORG tentang Penegasan Pengaturan Pakaian Dinas ASN Wanita di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 065/478/ORG Tentang Penetapan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar pertanggal 3 april 2021
4. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor 065/479/ORG Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/atau Kegiatan Mudik dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar pertanggal 9 April 2021
5. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor : 065/525/ORG tentang Pakaian ASN Wanita pada Hari Kartini di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar pertanggal 20 April 2021.
6. Surat Edaran Bupati Banjar Nomro 065/700/ORG tentang Hari Libur/diliburkan dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar pertanggal 8 Juni 2021.
7. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor : 065/793/ORG tentang Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 pertanggal 30 Juni 2021.
8. Surat Edaran Bupati Banjar nomor: 65/911/ORG tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar pertanggal 27 Juli 2021.
9. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor :065/1446/ORG Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru 2022 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Faktor Penghambat Keberhasilan pencapaian Sub kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana yakni :

1. Penyusunan dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Banjar Tahun 2021 sedikit mengalami keterlambatan karena faktor kondisi pandemi covid-19 yang meningkat sehingga pada beberapa unit layanan seperti kecamatan/kelurahan/puskesmas tidak dapat menyampaikan pelaporan tepat waktu.
2. Inovasi belum sepenuhnya di mengerti oleh ASN pada perangkat daerah.

Upaya mengatasi Faktor Penghambat Keberhasilan pencapaian Sub kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana yakni :

1. Terkait peningkatan kasus pandemi covid-19 sehingga terlambat penyampaian laporan SKM, tidak bisa diatasi karena faktor luas. Untuk mengatasinya kami berikan permakluman untuk sedikit terlambat dan selalu melakukan komunikasi untuk segera menyampaikan data dimaksud.
2. Dalam upaya peningkatan pemahaman perlunya Inovasi bagi semua ASN maka dilakukan sosialisasi menyeluruh baik langsung maupun tidak langsung serta memberikan penghargaan kepada ASN berinovasi dengan memberikan tambahan TPP.

### C. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

No	Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun n Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Program Penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota kegiatan Penataan Organisasi</b>	-	-	100 %	100 %	100	100 %	100
	Sub kegiatan peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	-	1 Dokumen, 4 laporan	1 Dokumen, 4 Laporan	100	1 Dokumen, 4 Laporan	100

Sumber : Bagian Organisasi

Sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan anggaran sebesar Rp. 544.536.400 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.521.700.000 (95,81%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.

Sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, meliputi :

- a. Koordinasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yakni Kinerja Triwulanan, SAKIP dan Asistensi SAKIP
- b. Reformasi Birokrasi, yakni PMPRB, Bintek RB dan Asistensi RB

Secara ringkas pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, sebagai berikut :

### **1. Koordinasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

#### **a. Kinerja**

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja ,Pelaporan Kinerja dan tata cara revidi atas pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah .Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, tujuan pelaporan kinerja ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam hal untuk Koordinasi SAKIP terhadap 34 (Tiga Puluh Empat) Perangkat Daerah & 20 (Dua Puluh) Kecamatan, Setiap Perangkat Daerah tersebut menyampaikan laporan Kinerja pertriwulan ke Bagian Organisasi dan menginput capaian kinerja di aplikasi Simondalev yang dijadikan dasar penilaian untuk hasil capaian kinerja masing-masing Perangkat Daerah kepada Bupati Banjar, serta menginput semua dokumen SAKIP pada E-SAKIP REVIU Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.

#### **b. SAKIP**

Menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Maka telah diadakan pendampingan/Asistensi kepada Seluruh Perangkat Daerah terkait dengan Penilaian SAKIP Tahun 2020.

Pada Tanggal 2 September 2021 juga diadakan Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara Online. Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan arahan terkait dengan Perbaikan nilai SAKIP untuk Pemerintah Kabupaten Banjar, antara lain :

- Agar Kabupaten Banjar dapat menerapkan SAKIP secara komprehensif.
- Memberikan reward dan punishment atas SAKIP dan Reformasi Birokrasi kepada Perangkat Daerah sesuai argument yang dipaparkan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk perbaikan nilai SAKIP.
- Untuk kedepannya diharapkan Pemberian TPP di Kabupaten Banjar disesuaikan dengan beban kerja dan daftar hadir secara professional sesuai argument E-Sejati yang telah dipaparkan.

- Membuat Integrasi SPBE terkait perencanaan keuangan dan pelaporan kepegawaian perizinan dan segala aplikasi wajib melalui Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan persandian Kabupaten Banjar.
- Membuat pedoman Peraturan Bupati Banjar IKI atau Indikator Kinerja Individu yang bukan SKP dan Bukan PK
- Dilakukan pembinaan secara berkala oleh Bapelitbang dan Inspektorat terkait aplikasi SPIP kesemua SKPD yang ada di Kabupaten Banjar.
- Mengoptimalkan Klinik Perencanaan supaya dapat memberikan informasi terkait bidang perencanaan, agar SKPD di Kabupaten Banjar bisa terbantu dengan permasalahan yang ada.

Beberapa hal diatas yang perlu dilakukan sehubungan dengan perbaikan nilai SAKIP Kabupaten Banjar Tahun 2021. Implementasi SAKIP di Kabupaten Banjar itu sendiri tiap tahun mengalami peningkatan dari tahun ketahun. hal ini dapat dilihat dari nilai SAKIP sebelumnya. SAKIP Tahun 2016 = 62,62 persen, tahun 2017 = 68,61 persen dan 2018 = 68,70 persen, Tahun 2019 = 68,97 persen Beberapa hal telah dilakukan guna meningkatkan Implementasi SAKIP di Kabupaten Banjar yaitu telah dilakukan perubahan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banjar Tahun 2018 dengan Indikator Kinerja. Tim Evaluator SAKIP Kabupaten Banjar yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Adminitrasi Umum, Inspektorat, Bapelitbang serta Bagian Organisasi saling berintegrasi, selalu berupaya agar predikat Pemerinta Kabupaten Banjar terus meningkat selaras pembangunan dan inovasi yang telah dilakukan diberbagai elemen.

Pemerintah Kabupaten Banjar pada kesempatan ini juga menyerahkan reward pada apel peringatan hari jadi Kabupaten Banjar ke -71 Tahun 2021 kepada Perangkat Daerah yang nilai pengelolaan SAKIPnya terbaik dan Punishmant kepada Perangkat Daerah yang SAKIPnya terendah.

#### **c. Asistensi SAKIP**

Sehubungan akan dilaksanakannya Evaluasi Pengelolaan SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Nerara dan Reformasi Birokrasi, maka Pada tanggal 23 s.d 26 Agustus 2021 bertempat di Aula Barakat telah dilaksanakan Kegiatan Asistensi inputan Dokumen SAKIP yang di ikuti seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Banjar dengan cara desk. Tujuan diadakannya Asistensi tersebut agar data/dokumen SAKIP yang akan di input pada esr.menpan.go.id oleh masing masing Perangkat daerah telah sesuai dengan ketentuan dari KemenPan RB.

Kegiatan asistensi SAKIP di isi oleh narasumber dari Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan ibu Tutinaya, yang menyampaikan banyak hal berkaitan dengan pengelolaan SAKIP dan peran utama tim SAKIP dari perencanaan, pemantauan, pengendalian hingga evaluasi dan monitoring serta reviu hasilnya.

Dengan pelaksanaan asistensi ini diharapkan tingkat pemahaman pengelola SAKIP baik level kabupaten maupun perangkat Daerah dapat meningkat dan menjadi sistem dalam budaya kerja pada perangkat daerah tersebut.

## 2. Reformasi Birokrasi

### a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Sebagai upaya penerapan Reformasi Birokrasi di daerah, maka perlu dilakukan evaluasi dengan cara evaluasi mandiri yang selanjutnya hasil evaluasi mandiri akan dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah.

- Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan 8 area perubahannya maka upaya pertama adalah dilakukan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, yang terdiri dari tim penanggung jawab dan tim pelaksana. Tim pelaksana terdiri atas Admin, Tim penilai internal, asessor pusat dan asessor unit.
- Kemudian Dilakukan asistensi/Pendampingan terhadap 10 perangkat daerah yang dipilih terkait pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
- Tim dari Inspektorat melakukan verifikasi terhadap Perangkat Daerah mengenai kelengkapan dokumen terkait dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ( PMPRB ) dibagi dalam masing-masing desk.
- Perangkat Daerah ( SKPD) yang terkait dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) melengkapi dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- Selanjutnya dokumen yang telah lengkap akan dihimpun dan di input oleh Tim Inspektorat. Tim dari Inspektorat sebagai bagian dari Tim Evaluator.

Adanya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sebagai upaya perbaikan dari Pemerintah Daerah itu sendiri. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assesement) oleh Pemerintah Daerah.

Pada tanggal 22 s.d 25 Februari terlebih dahulu dilakukan Kegiatan Pendampingan PMPRB Tahun 2021 terhadap 34 Perangkat Daerah hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan pengelolaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Banjar dan untuk memaksimalkan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 agar berjalan efektif dan tepat sasaran. Pengelolaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah

dilakukan pengukuran atas capaian yang dilaksanakan yakni melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebagai alat ukur sejauh mana Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan dan memberikan dampak peningkatan pengelolaan pemerintah yang baik.

Sebelum dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dilakukan evaluasi pendahuluan oleh tim SAKIP dan RB kepada perangkat daerah dengan cara memaparkan hasil PMPRB dan memaksimalkan upaya inovasi dalam rangka 8 area perubahan.

Pada tanggal 2 September 2021 telah dilakukan Evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara Online. Evaluasi dilakukan dengan cara desk yakni tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditunjuk melakukan wawancara dan tanya jawab secara langsung atas isian PMPRB yang telah diinput serta bukti dukung yang telah disampaikan.

Pada saat evaluasi tim melakukan kroscek PMPRB yang telah dilakukan oleh tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Banjar, apakah telah sesuai antara isian dengan bukti dukung yang ditampilkan dan diharuskan yang dilampirkan. Evaluasi berjalan lancar, sebagian besar data dukung dan isian telah sesuai, arahnya pada :

- Maksimalkan perangkat daerah yang melakukan PMPRB
- Fokus pada 8 area perubahan unit dan pusat
- Bukti dukung agar diperjelas dan disusun sesuai link yang ada
- Perlunya peningkatan kemampuan aparatur yang melaksanakan PMPRB dan agen of change maka perlu dilakukan bintek Reformasi Birokrasi
- Peningkatan kekompakan tim Reformasi Birokrasi.

#### **b. Bimtek RB**

Sebagai Upaya dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banjar maka perlu dilaksanakan Bimtek RB. pelaksanaan bimtek pengelolaan Reformasi Birokrasi ini sendiri sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menciptakan good governance .dengan adanya Bimbingan teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pengelolaan Reformasi Birokrasi serta tata cara Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi on-line oleh para asesor dan perator computer dilingkungan Perangkat Daerah yang nantinya dapat memberikan penilaian atas kinerja masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan indikator /elemenyang telah ditetapkan . Bimtek tersebut telah diikuti oleh para asesor pusat, asesor unit, Tim Penilai Internal dan Kasubbag Perencanaan dengan total sebanyak 65 orang yang berlangsung pada tanggal 11 s.d 14 Oktober 2021 bertempat di Grand Dapam Q hotel Banjarbaru. Bimtek tersebut hasil Kerjasama

Bagian Organisasi Setda Banjar dengan GAMA Multi Usaha Mandiri Universitas Gadjah Mad Yogyakarta.

**c. Asistensi RB**

Sehubungan dengan upaya peningkatan pengelolaan RB pada Pemerintah Kabupaten Banjar dan memaksimalkan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2021 agar berjalan efektif dan tepat sasaran maka terlebih dahulu diadakan kegiatan pendampingan/asistensi bagi seluruh

Perangkat Daerah .kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 25 Februari 2021 bertempat di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar. Asistensi /pendampingan tersebut dengan narasumber dari Tim RB Kabupaten yang terdiri dari Kabag, Sekretaris Inspektur, Asesor Pusat, dan Tim Penilai Internal. diharapkan dengan adanya Asistensi /Pendampingan tersebut Para asesor unit dalam inputan pengisian LKE PMPRB online sudah sesuai dengan ketentuan dari KemenPan RB.

Selain asistensi secara menyeluruh tahapan PMPRB kepada semua perangkat daerah, dilakukan pula pendampingan secara khusus kepada 10 perangkat daerah yang menjadi sampel untuk dievaluasi oleh KemenpanRB. Pendampingan secara detail terhadap semua aspek pada 8 area perubahan serta input PMPRB online.

Faktor keberhasilan Sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, meliputi :

- a) Telah terlaksana dengan baik dan lancar kegiatan asistensi SAKIP dan asistensi RB dalam upaya peningkatan pemahaman perangkat daerah tentang SAKIP dan RB.
- b) Pelaporan Kinerja Triwulanan perangkat daerah berjalan dengan baik dan tepat waktu, hal ini didukung oleh kerjasama yang solid semua perangkat daerah.
- c) Evaluasi SAKIP dan PMPRB terlaksana dengan baik dan sesuai dengan arahan KemenpanRB semua telah ditindaklanjuti dengan baik berkat adanya koordinasi dan kerjasam menyeluruh tim dan perangkat daerah.

Upaya peningkatan keberhasilan Sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, antara lain :

1. Diharapkan kedepan dalam rangka pemantauan dan monitoring evaluasi SAKIP perlu adanya sistem terintegrasi yang dapat dipantau secara online, sehingga pengelolaan SAKIP di Kabupaten Banjar semakin baik.
2. Kegiatan asistensi dan pendampingan SAKIP dan PMPRB agar terus dilaksanakan setiap tahunnya sebagai upaya peningkatan pemahaman kepada tim dan perangkat daerah.

## B.5 SASARAN MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH

**Tabel 21 Realisasi Indikator Tahun 2021**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Nilai/Skor EKPPD	3,2000	3.5069	109,59%

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banjar

Sasaran meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja sasaran Nilai/Skor EKPPD.

Indikator kinerja nilai/skor EKPPD memiliki definisi operasional berupa menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, sedangkan formulasinya berupa penilaian yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah diwujudkan melalui penyusunan Laporan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai kewajiban yang harus disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah adalah lembaga yang melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dimana menghasilkan nilai/skor EPPD dan EKPPD yang menjadi indikator kinerja utama.

Pada tahun 2021 nilai EKPPD belum dapat diketahui sampai dengan tanggal 13 Januari 2022. Sehingga untuk laporan LKJIP tahun 2021 ini digunakan nilai sementara yaitu 3,5069

Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banjar telah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut untuk mencapai sasaran :

NO.	PERIODE	REALISASI KEGIATAN
1.	Triwulan I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Tim Penyusun LPPD.</li> <li>2. Asistensi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).</li> <li>3. Pengumpulan bahan LPPD 2020 dari SKPD dan Kecamatan.</li> <li>4. Penyusunan LPPD 2020.</li> <li>5. Review LPPD 2020 oleh Inspektorat Kabupaten Banjar.</li> </ol>

		6. Penyempurnaan, pencetakan dan penyampaian LPPD 2020 ke Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Selatan.
2.	Triwulan II	Penyempurnaan kelengkapan data dukung LPPD
3.	Triwulan III	1. Evaluasi LPPD oleh Tim EPPD Provinsi 2. Perbaiki LPPD dan data dukung LPPD 3. Evaluasi LPPD oleh Tim EPPD Nasional/Pusat
4.	Triwulan IV	1. Evaluasi LPPD oleh Tim EPPD Nasional/Pusat 2. Sosialisasi penyusunan LPPD tahun 2021.

Faktor keberhasilan dan kegagalan sasaran ini adalah :

#### 1. Faktor Keberhasilan

Adapun faktor keberhasilan Nilai/Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yaitu :

- 1) Capaian kinerja pada indikator kinerja kunci (IKK) sesuai dengan target yang ditetapkan.
- 2) Kegiatan yang mendukung indikator kinerja kunci (IKK) agar didokumentasikan, sehingga ketika penyusunan LPPD data dukung dapat disampaikan.
- 3) Kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah terjalin dengan baik dan lancar, sehingga setiap permintaan data dukung dari Bagian Pemerintahan Setda Kab.Banjar dapat ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah.
- 4) Sumber Daya Manusia atau aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah berkualitas, sehingga mampu memahami tugas fungsi untuk urusan yang diembah oleh Organisasi Perangkat Daerahnya.

#### 2. Faktor Kegagalan

Adapun faktor kegagalan Nilai/Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yaitu :

- 1) Indikator kinerja kunci (IKK) yang digunakan untuk penyusunan LPPD Tahun 2021 berpedoman pada regulasi baru yang mana, Kabupaten Banjar belum pernah mendapatkan sosialisasi ataupun Bimbingan Teknis.
- 2) Disebabkan pandemic Covid-19 yang masih terjadi pada tahun 2021, sehingga Kementerian Dalam Negeri tidak bisa melakukan evaluasi tatap muka. Evaluasi hanya dilakukan pada aplikasi E-LPPD dimana pada aplikasi tersebut, tidak tercantum nilai/Skor evaluasi, sehingga sampai dengan saat ini Kabupaten/Kota seluruh Indonesia tidak mengetahui nilai/Skor EPPD.
- 3) Adanya inkonsistensi antara data awal yang ditampilkan di LPPD dengan saat EPPD.
- 4) Perbedaan pandangan dalam memahami indikator kinerja kunci (IKK) antara Organisasi Perangkat Daerah dengan pedoman penyusunan LPPD.
- 5) Terdapat beberapa indikator kinerja kunci (IKK) Kabupaten yang belum dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Banjar.

- 6) Terdapat beberapa indikator kinerja kunci (IKK) Kabupaten yang bukan merupakan kewenangan Kabupaten.

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran :

1. Perlu adanya sinergitas yang lebih baik antar Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Banjar.
2. Indikator kinerja kunci (IKK) menjadi salah satu target dalam Renstra.
3. Agar setiap semester diadakan monitoring dan evaluasi terhadap indikator kinerja kunci (IKK) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, sehingga LPPD bukan hanya kegiatan yang dilakukan satu waktu saja. Namun demikian dalam pelaksanaannya diperlukan dukungan dana khususnya untuk anggaran makan minum rapat.
4. Organisasi Perangkat Daerah penyusun LPPD agar lebih aktif berkoordinasi dengan OPD teknis di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan studi banding ke daerah lain yang memiliki capaian kinerja lebih baik diurus yang diampunya.

Upaya Perbaikan :

1. Pada akhir tahun akan selalu dilakukan sosialisasi penyusunan LPPD untuk di tahun mendatang.
2. Surat edaran dan format penyusunan telah diberikan pada bulan Desember 2020.
3. Pada bulan Januari 2022 dilakukan asistensi untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah.
4. Membangun komunikasi yang intens dengan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Selatan dan BPKP.

Tindak lanjut yang akan datang :

1. Meningkatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah.
2. Melakukan review capaian kinerja yang terdapat dalam indikator kinerja kunci (IKK) per semester, sehingga capaian kinerja per urusan dapat lebih diawasi.
3. Meningkatkan intensitas rapat ataupun asistensi dalam rangka menyamakan persepsi terkait makna indikator kinerja kunci (IKK).
4. Peningkatan wawasan ataupun studi referensi penyusunan LPPD ke Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil memperoleh skor EPPD yang terbaik.

Adapun tingkat capaian program dan kegiatan secara rinci sebagai berikut :

**Tabel 22 Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021 Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun N terhadap target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/ Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Peta 3 Segmen batas 2 Laporan 4 Laporan 10 Patok 1 Laporan		1 Peta 3 Segmen batas 2 Laporan 4 Laporan 10 Patok 1 Laporan	1 Peta 3 Segmen batas 2 Laporan 4 Laporan 5 Patok 1 Laporan		1 Peta 3 Segmen batas 2 Laporan 4 Laporan 10 Patok 1 Laporan	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	100
	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah							
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	100 % 1 Laporan	100	100 % 1 Laporan	100 % 1 Laporan	100	1 Laporan	

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Setda Kab.Banjar

### **Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 395.111.700,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 379.173.524,- (95,97%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.

Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan sebagai berikut :

#### **A. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun N terhadap target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/ Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	100

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Setda Kab.Banjar

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 39.344.500,- dengan realisasi fisik sebesar Rp. 37.239.000,- (94,65%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada sub kegiatan penataan administrasi pemerintahan realisasi kinerja 1(satu) tahun dengan capaian 100%.

Adapun realisasi sub kegiatan berupa 1 (satu) Laporan Koordinasi Lingkup Urusan Pemerintahan di Kabupaten Banjar Tahun 2021.

Faktor Keberhasilan :

- a) Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah terkait mengenai urusan pemerintahan sesuai arahan pimpinan.

Faktor Kegagalan :

- a) Kurangnya informasi dan koordinasi dari SKPD terkait Hanya tersedia peta RBI skala 1: 50.000 dan citra satelit masih yang lama.

#### B. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun N terhadap target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/ Kegiatan	100	100	100	100	100	100	100

	Administrasi Tata Pemerintahan							
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Peta 3 Segmen batas 2 Laporan 4 Laporan 10 Patok 1 Laporan		1 Peta 3 Segmen batas 2 Laporan 4 Laporan 10 Patok 1 Laporan	1 Peta 3 Segmen batas 2 Laporan 4 Laporan 5 Patok 1 Laporan		1 Peta 3 Segmen batas 2 Laporan 4 Laporan 10 Patok 1 Laporan	

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Setda Kab.Banjar

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 269.245.700,- dengan realisasi fisik sebesar Rp. 259.101.924,- (96,23%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada sub kegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan adalah :

NO	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN
1	1 Peta	1 Peta	100%
2	3 Segmen batas	3 Segmen batas	100%
3	2 Laporan	2 Laporan	100%
4	4 Laporan	4 Laporan	100%
5	10 Patok	5 Patok	Terdapat kesalahan dalam penentuan target kinerja
6	1 Laporan	1 Laporan	100%

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab.Banjar

Adapun realisasi sub kegiatan berupa :

- a) 1 Peta Rupa Bumi (Toponimi) Kecamatan Tatah Makmur Kab.Banjar.
- b) 3 segmen batas daerah yaitu 1) Segmen Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Laut yang berlokasi di Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Karang Intan dan Kecamatan Aranio; 2) Segmen Batas Kecamatan Martapura dengan Kecamatan Martapura Timur, pada sub segmen Desa Pasayangan Utara Kecamatan Martapura dengan Desa Antasan Senor Ilir Kecamatan Martapura Timur; 3) Segmen Batas Kecamatan Martapura Barat dengan Kecamatan Cintapuri Darussalam pada sub segmen Desa Antasan Sutun Kecamatan Martapura Barat dengan Desa Simpang Lima Kecamatan Cintapuri Darussalam.
- c) 1 Laporan Profil Kecamatan Tahun 2020 dan 1 Laporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Tahun 2021.
- d) 1 Laporan Monitoring dan Evaluasi Batas Wilayah pada Triwulan I, 1 Laporan Monitoring dan Evaluasi Batas Wilayah pada Triwulan II, 1 Laporan Monitoring dan Evaluasi Batas Wilayah pada Triwulan III dan 1 Laporan Monitoring dan Evaluasi Batas Wilayah pada Triwulan IV.

- e) Dibangunnya 5 patok batas wilayah administrasi pada 2 Segmen Batas dengan perincian sebagai berikut 3 patok batas administrasi Kabupaten dipasang pada segmen batas Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru yang berlokasi di Kecamatan Gambut. Kemudian 2 patok batas administrasi Kecamatan dipasang pada segmen batas Kecamatan Martapura dengan Kecamatan Martapura Timur yang berlokasi di Kelurahan Pasayangan.
- f) 1 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Kelurahan Tahun 2021.

## Faktor Keberhasilan :

- a) Adanya Kerjasama pihak kecamatan dan kelurahan dalam koordinasi dan memberikan data terkait Kewilayahan ;
- b) Tersedianya Peta dasar berupa Peta RBI skala 1:5000 dan Citra satelit Resolusi Tinggi yang update sebagai bahan survey batas wilayah ;
- c) Tersedianya SDM yang menguasai keahlian Pemetaan ;
- d) Kerjasama dari pihak desa dalam pengajuan anggaran untuk kegiatan penataan batas desa.

## Faktor Kegagalan :

- a) Kurangnya informasi dan koordinasi dari pihak kecamatan dan kelurahan serta SKPD terkait ;
- b) Hanya tersedia peta RBI skala 1: 50.000 dan citra satelit masih yang lama ;
- c) Jumlah SDM untuk survey terbatas dan kurangnya keterampilan keahlian pemetaan ;
- d) Anggaran dari desa berkurang untuk kegiatan penataan batas desa.

## C. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun N terhadap target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	100

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Setda Kab.Banjar

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 86.521.500,- dengan realisasi fisik sebesar Rp. 82.832.600,- (95,74%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Target kinerja pada sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah realisasi kinerja 1(satu) tahun dengan capaian 100%.

Adapun realisasi sub kegiatan berupa :

- a) 1 Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020.
- b) 1 Dokumen Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020.

**Faktor Keberhasilan :**

- a) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ada dalam LPPD menjadi prioritas program dan kegiatan pada SKPD sehingga memudahkan SKPD untuk menyajikan data dukung saat penyusunan LPPD ;
- b) SPM menjadi Prioritas Program dan Kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar;
- c) SKPD melakukan penyampaian data yang cepat, tepat dan sesuai dengan format Penyusunan LKPJ.

**Faktor Kegagalan :**

- a) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ada dalam LPPD masih ada yang belum menjadi Program dan Kegiatan yang diselenggarakan SKPD sehingga tidak ada data dukung yang disajikan untuk pemenuhan data pada LPPD;
- b) SPM belum menjadi prioritas Program dan Kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar;
- c) SKPD terlambat mengumpulkan data dan data yang disampaikan tidak sesuai dengan format penyusunan LKPJ.

**D. Fasilitasi Kerja Sama Daerah**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun N terhadap target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/ Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	100 % 1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Setda Kab.Banjar

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 25.558.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 24.365.000,- (95,33%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri dengan pagu anggaran sebesar Rp 25.558.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 24.365.000,- (95,33%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.

Target kinerja pada sub kegiatan fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri realisasi kinerja 1(satu) tahun dengan capaian 100%.

Adapun realisasi sub kegiatan berupa :

- a) 100% permohonan fasilitasi dan koordinasi kerja sama daerah pada tahun 2021 telah dilaksanakan.
- b) 1 Laporan Monitoring dan evaluasi kerja sama antar daerah telah tersusun.

Faktor Keberhasilan :

- a) Pemahaman SKPD Pemrakarsa Kerja Sama Daerah terhadap Tata Cara dan Prosedur Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, dan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Pusat (Sinergi) ;

Faktor Kegagalan :

- a) SKPD Pemrakarsa yang mengusulkan pembahasan dokumen kerja sama belum memahami tata cara dan prosedur penyusunan dokumen kerja sama daerah.

### C. REALISASI ANGGARAN

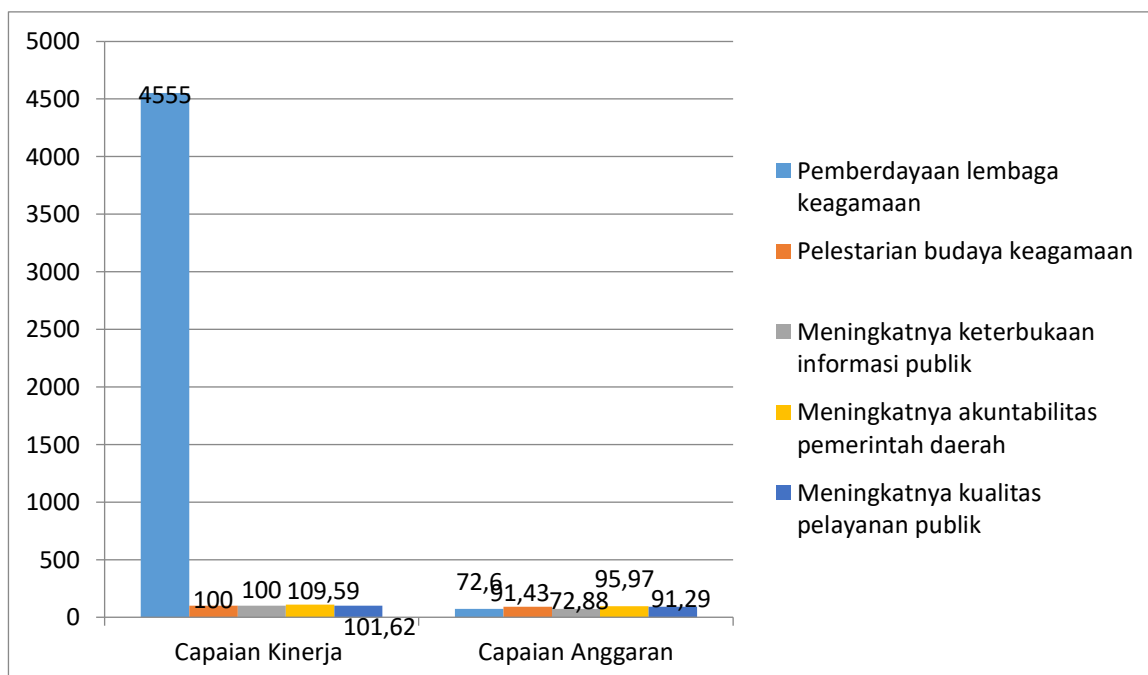
Anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 adalah Sebesar Rp. 38.994.534.505 dengan realisasi sebesar Rp. 35.129.854.702 atau (90,09%).

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	capaian %	Target	Realisasi	Realisasi %
						(Rp)	(Rp)	
1	Pemberdayaan lembaga keagamaan	Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan	11,13	507	4555	555.520.000	403.329.232	72,60
	Meningkatnya pengelolaan lembaga zakat	Jumlah ZIS yang terkumpul	699.840.000	1.975.238.029	282	555.520.000	403.329.232	72,60
2	Pelestarian budaya keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	100	100	100	3.648.157.400	3.335.489.248	91,43
	Meningkatnya kegiatan keagamaan yang diperingati	Persentase kegiatan keagamaan yang diperingati	100	100	100	3.648.157.400	3.335.489.248	91,43

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	capaian %	Target	Realisasi	Realisasi %
						(Rp)	(Rp)	
3	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase SKPD yang meginput RUP ke aplikasi SIRUP	100	100	100	563.418.100	410.619.151	72,88
	Meningkatnya paket pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu	92	100	109	563.418.100	410.619.151	72,88
4	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai/Skor EKPPD	109,59	35069	109,59	395.111.700	379.173.524	95,97
	Meningkatnya Persentase keterisian data Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan rata-rata ikm kecamatan	Persentase keterisian data Indikator Kinerja Kunci (IKK)	100	100	100	395.111.700	379.173.524	95,97
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,1	83,43	101,62	789.291.000	720.583.052	91,29
	Meningkatnya Prosentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumentasi road map reformasi birokrasi	Prosentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumentasi road map reformasi birokrasi	100	100	100	789.291.000	720.583.052	91,29
BELANJA LANGSUNG UTAMA						5.951.498.200	5.249.194.207	88,20

Sumber : Bagian-bagian Sekretariat Daerah

Grafik 4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021



Dari Grafik diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tahun 2021 pada Sasaran Pemberdayaan Lembaga Keagamaan untuk capaian kinerja sebesar 4.555% sedangkan untuk realisasi anggarannya adalah 72,60%
2. Capaian kinerja tahun 2021 pada Sasaran Pelestarian Budaya Keagamaan adalah 100% sedangkan penyerapan anggarannya adalah 91,43%;
3. Capaian kinerja tahun 2021 Sasaran Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik adalah 100 % sedangkan penyerapan anggarannya adalah 72,88%;
4. Capaian kinerja tahun 2021 Sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pemerintah Daerah adalah sebesar 109,59 sedangkan penyerapan anggarannya adalah 95,97%;
5. Capaian kinerja tahun 2020 Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik adalah sebesar 101,62% sedangkan penyerapan anggarannya adalah 91,29%

### C.1 ANALISA EFESIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa 5 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran Pemberdayaan Lembaga Keagamaan, telah mencapai kinerja sebanyak 4.555%

namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 91,61 dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Meningkatnya keterbukaan informasi publik, dengan pencapaian kinerja sebanyak 100%, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 78,20%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 23 Efisien Penggunaan Sumber Daya

	Saaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(≥ 100%)		
1	Pemberdayaan lembaga keagamaan	Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan	4,555	91,61	8,39
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah ZIS yang terkumpul	282	91,61	8,39
2	Pelestarian budaya keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	100	91,61	8,39
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	282w	91,61	8,39
3	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase SKPD yang meginput RUP ke aplikasi SIRUP	100	78,20	21,8
	Program pengadaan barang dan jasa	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu	100	78,20	21,8
4	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai/Skor EKPPD	3,5069	95,97	4,03
	Program penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase keterisian data Indikator Kinerja Kunci (IKK)	100	95,97	4,03
		Rata-rata IKM Kecamatan	101,74	95,97	4,03
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	101,62	91,29	8,71

	Saaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			( $\geq 100\%$ )		
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan pembinaan kelembagaan	Prosentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumentasi road map reformasi birokrasi	100	91,29	8,71

Sumber : Bagian-bagian Sekretariat Daerah

#### D. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

##### D.1 EVALUASI KINERJA TAHUN 2020

Hasil evaluasi dari inspektorat Kabupaten Banjar Terhadap Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 memperoleh nilai 83,58 dengan interpretasi predikat A maka pada tahun 2021 direkomendasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar hal-hal sebagai berikut :

1. Menyusun Jadwal Mekanisme atau SOP yang jelas tentang monitoring target Jangka Menengah dalam Renstra secara periodik ;
2. Menetapkan tim yang bertanggungjawab untuk pengumpulan data kinerja ;
3. Informasi capaian kinerja dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar *reward* dan *punishment* ;
4. Pelaksanaan penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan alternatif yang diberikan beserta tindak lanjutnya

##### D.2 TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari inspektorat, Sekretariat Daerah telah melaksanakan upaya sebagai berikut :

1. Telah disusun Jadwal Mekanisme atau SOP yang jelas tentang monitoring target Jangka Menengah dalam Renstra secara periodik ;
2. Telah ditetapkan tim yang bertanggungjawab untuk pengumpulan data kinerja dengan ;
3. Informasi capaian kinerja telah dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar *reward* dan *punishment*.

## BAB IV PENUTUP

### 1. KESIMPULAN

Hasil Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja 'Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan' dengan capaian kerjanya 4.555% ;
2. Indikator Kinerja 'Persentase kegiatan keagamaan yang terfasilitasi' dengan capaian kerjanya 100% ;
3. Indikator Kinerja 'Persentase SKPD Yang menginput RUP ke aplikasi SIRUP' dengan capaian kerjanya 100% ;
4. Indikator Kinerja 'Indeks Kepuasan Masyarakat' dengan capaian kerjanya 101,62% ;
5. Indikator Kinerja 'Nilai/Skor EKPPD' dengan capaian kerjanya 109,59%.

### 2. SARAN-SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk sasaran Pelestarian Budaya Keagamaan disarankan lebih meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan ;
2. Untuk Sasaran Keterbukaan Informasi Publik disarankan ditingkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD agar penginputan SiRUP tepat waktu ;
3. Untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik disarankan agar bisa lebih meningkatkan SDM nya dalam hal pelaksanaan dalam pelayanan.

Laporan Kinerja Sekretariat daerah kabupaten banjar tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

**LAMPIRAN**

1. PK.;
2. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya ;
3. SOP LKjIP ;
4. SK Penyusun ;
5. Daftar Penghar

